



BAB III

PROSES DAN HASIL PELAKSANAAN KLHS

3.1 Tahap Persiapan

Tahap Persiapan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng 2017-2022 merupakan tahap pelebagaan pelaksanaan KLHS. Pada tahap ini dibentuk Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan (POKJA PL) dan Penunjukan Tim Ahli KLHS RPJMD berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng No. 660/481/HK/2017, tentang Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan (POKJA PL) dan Penunjukan Tim Ahli Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, seperti tersaji pada lampiran 1. Kelompok kerja ini memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan rumusan penyusunan KHLS;
2. Menyiapkan langkah-langkah koordinasi, pengendalian dan pemantapan pelaksanaan penyusunan KHLS;
3. Menyiapkan bahan dan arahan bagi pelaksana penyusunan KHLS; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Dalam tahap persiapan ini, tim memiliki pembagian tugas yang jelas, yang masing-masing bertanggungjawab untuk dapat menyelesaikan KHLS RPJMD 2017-2022 tepat waktu, dan tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



3.2 Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan

3.2.1 Pra Pelingkupan

Proses KHLS ini dilakukan untuk dapat menjamin terlaksananya program pembangunan yang berkelanjutan, dalam rangka menjamin keutuhan lingkungan hidup, dan keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, serta keselamatan hidup manusia. Berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2012, Pra Pelingkupan dalam pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah adalah proses mengidentifikasi daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan yang terdiri atas isu-isu sosial/budaya, ekonomi, dan lingkungan. Proses pelingkupan diawali dengan Tahap Pra Pelingkupan. Pada tahap ini POKJA PL melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi, melalui diskusi internal Pokja PL;
- b. Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan isu-isu lingkungan hidup, seperti gambaran umum kondisi daerah, hasil-hasil kajian, dan publikasi-publikasi yang ada;
- c. Mengidentifikasi jenis dan sumber data yang masih diperlukan namun belum tersedia; dan
- d. Menginventarisasi pemangku kepentingan yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan KLHS sesuai dengan daftar panjang isu pembangunan.

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2012 pasal 12, guna mengumpulkan berbagai informasi terkait isu-isu lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat, untuk dapat memperlancar tahapan-tahapan KHLS selanjutnya.

Hasil inventarisasi isu-isu pembangunan berkelanjutan masing-masing anggota POKJA PL selanjutnya dikompilasi dalam bentuk daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan, yang dikelompokkan ke



dalam isu-isu lingkungan, isu-isu ekonomi, dan isu-isu sosial budaya, hasil kegiatan ini dapat merangkum tiga isu strategis yang penting yang diperoleh dari kegiatan fokus group diskusi (FGD), penelusuran berbagai informasi oleh Pokja PL, yang telah ditampilkan pada Bab II dalam KHLS ini. Sebagai gambaran tentang isu-isu lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya telah disampaikan di Bab II, disajikan secara ringkas pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Daftar Panjang Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan
Hasil Pra Pelingkupan

ISU-ISU PEMBANGUNAN TERIDENTIFIKASI	
A	LINGKUNGAN HIDUP
(1)	(2)
1	Abrasi Pantai
2	AliH Fungsi Lahan Pertanian
3	Air Bersih
4	Air Limbah
5	Bencana Alam
6	Bencana Longsor
7	Bloking Pantai
8	Debit Mata Air
9	Degradasi Lahan Pertanian
10	Distrutif fishing
11	Kawasan Kumuh
12	Kekurangan Air untuk Pertanian Lahan Kering (Gerokgak dan Tejakula)
13	Kerusakan Lahan
14	KJA di Danau Buyan
15	Kondisi DAS
16	Konflik Tambak dengan Nelayan
17	Konversi Hutan
18	Kurangnya Reboisasi Hutan
19	Lahan Kritis
20	Limbah B3
21	Limbah Ternak Babi
22	Pecemaran Lingkungan
23	Perambahan Hutan
24	Pemburuan Satwa



(1)	(2)
25	Pencemaran Air
26	Pencemaran Tanah
27	Pencemaran Udara PLTU Celukanbawang
28	Pengambilan Air Tanah
29	Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat
30	Pengembangan Rumah ke Pedesaan
31	Penggunaan Kawasan Hutan tidak sesuai Peruntukan
32	Penggunaan Pupuk Kimia
33	Pengurukan Sungai
34	Perambahan Hutan untuk Wisata
35	Perambahan Sempadan Sungai
36	Perubahan Iklim
37	Perusakan Terumbu Karang
38	Polusi Udara
39	Rawan Kekeringan
40	RTH Perkotaan
41	Sanitasi
42	Sarana Persampahan
43	Sumber Daya Air semakin berkurang
44	Galian C
45	SUTT Transmisi PLTU
46	penggunaan pestisida
47	perusakan hutan
48	Kepemilikan air secara privat
B	EKONOMI
1	Bantuan masyarakat bersifat parsial
2	Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis ekonomi
3	Biaya pendidikan tinggi
4	Bursa komoditi kreatif belum ada
5	Daya beli masyarakat masih rendah
6	DTW potensial dan langka belum dikelola
7	Harga pangan tidak stabil
8	Iklim investasi yang kurang kondusif



(1)	(2)
9	Informasi komoditas/produk unggulan yang dikembangkan
10	Infrastruktur pariwisata
11	Infrastruktur wilayah untuk konektivitas bali utara dan selatan
12	Jiwa kompetisi rendah
13	Kemiskinan meningkat
14	Kemitraan petani dengan swasta
15	Kesadaran membayar pajak masih rendah
16	Kesempatan kerja terbatas
17	Ketrampilan hidup
18	Kewirausahaan masih rendah
19	Konflik pedagang kecil dengan waralaba
20	Minat generasi muda di pertanian rendah
21	Pasca panen dan pengolahan
22	Pemasaran daur ulang sampah plastik belum optimal
23	Pembiayaan UMKM
24	Pembinaan UKM masih rendah
25	Pemerataan fasilitas sandang, pangan, papan
26	Pemungutan pajak parkir
27	Penanaman modal masih kurang
28	Pendapatan perkapita masih rendah
29	Pengawasan makanan dan obat
30	Pengembangan pasar tradisional
31	Penjualan hasil kreatifitas siswa di sekolah
32	Potensi desa belum optimal
33	Promosi hasil pertanian
34	Revitalisasi sektor pertanian terpadu
35	Sistem pemungutan pajak sektor pariwisata dan perdagangan
36	Struktur UMKM didominasi oleh Usaha Menengah
37	Tingkat pengangguran tinggi
38	Usaha daur ulang belum berkembang
39	Usaha garam rakyat
40	Belum optimal CSR



(1)	(2)
41	Kesenjangan antara kaya dan miskin
C	Sosial Budaya
1	Penguasaan IT masih rendah
2	Persaingan SDM global
3	Akurasi database penduduk rendah
4	Banyaknya bunuh diri
5	Budaya Baca Siswa
6	Budaya Gotong Royong
7	Interaksi masyarakat kurang
8	Jumlah dan kapasitas Lembaga sosial masih rendah
9	KDRT
10	Kebutuhan dasar PMKS
11	Kekerasan terhadap anak
12	Kemampuan SDM PMKS
13	Kenakalan Remaja
14	Kesenjangan Pendidikan di Desa
15	Komunikasi informasi dan edukasi sosial
16	Konflik adat (tanah adat)
17	Konflik batas desa
18	Konflik identitas (<i>Clan</i>)
19	Kualitas dan akses kesehatan
20	Kualitas pelayanan administrasi penduduk rendah
21	Kurangnya rasa hormat anak-anak terhadap orang tua
22	Memudarnya eksistensi kearifan lokal dalam membendung perilaku generasi muda
23	Memudarnya kecintaan terhadap budaya sendiri
24	Menurunnya ketaatan masyarakat terhadap awig-awig
25	Pelestarian budaya masih rendah
26	Pelestarian keanekaragaman hayati untuk ritual masih rendah
27	Pelestarian situs sejarah
28	Pembinaan sanggar seni
29	Penanganan masalah PSK terselubung
30	Penanganan pengungsi (eks Tim-Tim)
31	Penanganan PMKS belum optimal
32	Pendirian tempat-tempat ibadah baru
33	Penduduk pendatang
34	Pengaruh teknologi yang negatif
35	Penggunaan baju adat bagi remaja
36	Penghargaan kepada seniman



(1)	(2)
37	Penyakit masyarakat
38	Penyalahgunaan Narkoba
39	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih tinggi
40	Penyebaran penduduk tidak merata
41	Penyuluhan Bidang Sosial
42	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
43	Persaingan SDM (tenaga kerja) - MEA
44	Premanisme Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)
45	Program KB Menurun
46	Proteksi Pengaruh Budaya Luar Masih Lemah
47	Ruang publik perkotaan (termasuk untuk anak-anak)
48	Rumah singgah belum tersedia (Gepeng, dll)
49	Tri Hita Karana
50	Rumah tangga miskin meningkat

Sumber: Hasil FGD Pokja PL KHLS

3.2.2 Tahap Pelingkupan

Tahap ini, merupakan proses merumuskan daftar panjang isu-isu pembangunan menjadi daftar pendek bersama pokja PL dan pemangku kepentingan. Tahap ini dilakukan dengan memverifikasi daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan, penapisan daftar panjang isu-isu lingkungan, isu-isu ekonomi, dan isu-isu sosial budaya berdasarkan ketentuan Pasal 9 PP No, 46 Tahun 2016. Penapisan dilakukan dengan mempertimbangkan unsur-unsur: (1) karakteristik wilayah, (2) tingkat pentingnya potensi dampak, keterkaitan antar isu isu strategis pembangunan berkelanjutan, (3) keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program, (4) muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/ atau relevansi langsung. Hasil pelingkupan secara lengkap tersaji pada Lampiran 10.



Dari hasil pra pelingkupan diperoleh 149 isu sebagai daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan, dengan rincian 48 isu kelompok isu lingkungan, 41 isu kelompok isu ekonomi, dan 50 isu kelompok isu sosial budaya. Selanjutnya dari hasil pelingkupan diperoleh 19 isu strategis pembangunan berkelanjutan, dengan rincian : 5 isu kelompok isu lingkungan, 7 isu kelompok isu ekonomi, dan 7 isu kelompok isu sosial budaya. Selengkapnya daftar pendek isuisu strategis pembangunan berkelanjutan tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Isu-Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

ISU-ISU LINGKUNGAN STRATEGIS	
(1)	(2)
1	Menurunnya kondisi daerah aliran sungai (DAS)
2	Pencemaran lingkungan oleh air limbah
3	Sanitasi lingkungan belum memadai, terutama karena pengelolaan persampahan yang belum optimal
4	Kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang dan padang lamun
5	Ancaman perubahan iklim
ISU-ISU EKONOMI STRATEGIS	
1	Rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat, terutama generasi muda
2	Daya saing UMKM masih rendah
3	Kondisi ekonomi perdesaan belum mampu mencegah migrasi tenaga kerja produktif ke wilayah perkotaan ataupun ke luar daerah
4	Pendapatan perkapita penduduk masih rendah dan belum merata
5	Iklim investasi belum kondusif
6	Kndisi infrastruktur kawasan strategis belum optimal
7	Kesenjangan ekonomi antar wilayah perdesaan dan kecamatan masih tinggi
ISU-ISU SOSIAL DAN BUDAYA STRATEGIS	
1	Lunturnya kearifan lokal karena meningkatnya pengaruh budaya asing
2	Pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi dan persebaran penduduk tidak merata
3	Penanganan kemiskinan dan pengangguran belum optimal



ISU-ISU LINGKUNGAN STRATEGIS	
(1)	(2)
4	PMKS dan Pelayanan Sosial
5	Pelestarian Budaya belum optimal
6	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum optimal
7	Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan belum optimal

Sumber: Hasil Analisis dan FGD Pokja PL KHLS

Selain itu, telah dilakukan proses identifikasi data dan verifikasi data dari berbagai sumber data dan pemangku kepentingan guna penyusunan *baseline* berkaitan dengan isu-isu strategis yang digunakan untuk menyusun dokumen KHLS selanjutnya, seperti disajikan pada tabel 3.3. di bawah ini.

Tabel 3.3
Isu-Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan sebagai Muatan KLHS
dalam Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2022

No	Isu Strategis	Isu-Isu Terkait	Lokasi Isu	Pemangku Kepentingan Terkait
(1)	(2)	(3)	(2)	(4)
A	ISU-ISU LINGKUNGAN			
1.	Menurunnya kondisi daerah aliran sungai (DAS)	Alih fungsi lahan pertanian, bencana alam, bencana longsor, debit mata air, degradasi lahan pertanian, kekurangan air untuk pertanian di lahan kering (Gerokgak dan Tejakula), kerusakan lahan, kondisi DAS, konversi hutan, kurang reboisasi hutan, lahan kritis, perambahan hutan, pengambilan air tanah, penggunaan kawasan hutan tidak sesuai peruntukan, pengurugan sungai, perambahan sempadan sungai, rawan	Kawasan hulu DAS dan kawasan sekitar sungai	Distan Buleleng, Dinas Perikanan, Dinas PUPR, PDAM Buleleng, DLH Buleleng, Bappedalitban, BWS Bali, KPH Dishut Bali, LSM lingkungan, Perguruan Tinggi



No	Isu Strategis	Isu-Isu Terkait	Lokasi Isu	Pemangku Kepentingan Terkait
(1)	(2)	(3)	(2)	(4)
		kekeringan, sumber daya air semakin berkurang, kerusakan hutan, RTH Perkotaan		
2.	Pencemaran lingkungan oleh air limbah	Air limbah, kawasan kumuh, limbah B3, limbah ternak babi, pencemaran air, pencemaran tanah, pengembangan rumah perdesaan, penggunaan pupuk kimia, sanitasi, penggunaan pestisida	Sungai sekitar kawasan pariwisata Kalibukbuk, kawasan industri Celukan Bawang, area sekitar peternakan babi	DLH Buleleng, Dinas PUPR, Distan Buleleng, Dinas Perikanan, Dinas Perindag, Bappedalitbang, LSM lingkungan, Perguruan Tinggi
3.	Sanitasi lingkungan belum memadai, terutama karena pengelolaan persampahan yang belum optimal	Kawasan kumuh, pengelolaan sampah, pengembangan rumah perdesaan, RTH perkotaan, sarana persampahan, sanitasi	Kawasan Perkotaan dan kawasan yang belum terjangkau pelayanan persampahan	DLH Buleleng, Dinas PUPR, Bappedalitbang, Disperkimta, LSM lingkungan, Perguruan Tinggi
4.	Kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang dan padang lamun	Abrasi pantai, bloking pantai, destruktif fishing, kerusakan terumbu karang, galian C, perburuan satwa (laut)	Kawasan pantai Kecamatan Tejakula dan sekitar Lovina	DLH Buleleng, Dinas Perikanan, Bappedalitbang, PMD, LSM Lingkungan, Perguruan Tinggi
5.	Ancaman perubahan iklim	Abrasi pantai, alih fungsi lahan pertanian, bencana alam, bencana longsor, debit mata air, kerusakan lahan, kondisi DAS, konversi hutan, lahan kritis, limbah ternak babi, penggunaan pupuk kimia, perambahan hutan untuk wisata, perubahan iklim, RTH Perkotaan ,	Kawasan pesisir pantai Buleleng dan kawasan sekitar hutan	Distan Buleleng, Dinas Perikanan, Dinas PUPR, PDAM Buleleng, DLH Buleleng, Bappedalitbang, BWS Bali, KPH Dishut Bali, BMKG Bali, LSM



No	Isu Strategis	Isu-Isu Terkait	Lokasi Isu	Pemangku Kepentingan Terkait
(1)	(2)	(3)	(2)	(4)
		perusakan hutan, penggunaan pestisida		lingkungan, Perguruan Tinggi
B	ISU-ISU EKONOMI			
1.	Rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat, terutama generasi muda Kewirausahaa	Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis ekonomi, jiwa kompetisi rendah, kesempatan kerja terbatas, ketrampilan hidup, kewirausahaan masih rendah, minat generasi muda di pertanian rendah, tingkat pengangguran tinggi	Hampir seluruh perdesaan, khususnya generasi muda	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, Bappedalitbang, DLH, LSM Lingkungan, Perguruan Tinggi
2.	Daya saing UMKM masih rendah	Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis ekonomi, bursa komoditi kreatif belum ada, kesadaran membayar pajak masih rendah, konflikpedagang kecil dan waralaba, pembiayaan UMKM, pembinaan UKM masih rendah, penanaman modal masih kurang, pengembangan pasar tradisional, struktur UMKM didominasi oleh usaha menengah	Di seluruh wilayah Buleleng, terutama di pusat-pusat ekonomi desa	Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, Bappedalitbang, DLH, LSM Lingkungan, Perguruan Tinggi
3.	Kondisi ekonomi perdesaan belum mampu mencegah migrasi tenaga kerja produktif ke wilayah perkotaan ataupun ke luar daerah	Belum optimalnya pengembangan kawasan strateigis ekonomi, bursa komoditi kretif belum ada, infrastruktur pariwisata, kemitraan petani dan swasta, informasi komoditas/produk unggulan yang dikembangkan, kesempatan kerja terbatas, minat generasi muda di pertanian rendah, pasca panen dan	Kawasan perdesaan pada umumnya	Distan Buleleng, Dinas Perikanan, Dinas PUPR, Disperindag, Diskop & UKM, DLH Buleleng, Bappedalitban, LSM Lingkungan, Perguruan Tinggi, subak



No	Isu Strategis	Isu-Isu Terkait	Lokasi Isu	Pemangku Kepentingan Terkait
(1)	(2)	(3)	(2)	(4)
		pengolahan, usaha garam rakyat, pengembangan pasar tradisional, potensi desa belum optimal, promosi hasil pertanian, revitalisasi sektor pertanian terpadu		
4.	Pendapatan perkapita penduduk masih rendah dan belum merata	Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis ekonomi, biaya pendidikan tinggi, daya beli masyarakat masih rendah, harga pangan tidak stabil, infrastruktur pariwisata, kemiskinan meningkat, kemitraan petani dengan swasta, pemasaran daur ulang sampah plastik belum optimal, pemerataan fasilitas sandang, pangan, papan; penanaman modal masih kurang, pendapatan perkapita masih rendah, potensi desa belum optimal, promosi hasil pertanian, usaha garam rakyat	Desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Tejakula dan Gerokgak, serta beberapa desa di perkotaan	Distan Buleleng, Dinas Perikanan, Dinas PUPR, Disperindag, Diskop & UKM, DLH Buleleng, Bappedalitban, LSM Lingkungan, Perguruan Tinggi
5.	Iklim investasi belum kondusif	Iklim investasi yang kurang kondusif, informasi komoditi/produk unggulan yang dikembangkan, infrastruktur pariwisata, penanaman modal masih kurang, promosi hasil pertanian,	Kawasan strategis kabupaten (kawasan industri, pariwisata, agropolitan dan minapolitan)	DMPPTSP, Distan Buleleng, Dinas Perikanan, Dinas PUPR, Disperindag, Diskop & UKM, DLH Buleleng, Bappedalitban, LSM Lingkungan, Perguruan Tinggi
6.	Kondisi infrastruktur kawasan	Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis ekonomi, infrastruktur pariwisata,	Beberapa kawasan strategis kabupaten	Dinas PUPR, Disparda, Distan Buleleng,



No	Isu Strategis	Isu-Isu Terkait	Lokasi Isu	Pemangku Kepentingan Terkait
(1)	(2)	(3)	(2)	(4)
	strategis belum optimal	infrastruktur untuk konektivitas Bali Utara dan Selatan, pemerataan fasilitas sandang, pangan, papan		Disperindag, Diskop & UKM, DLH Buleleng, Bappedalitban, LSM Lingkungan, Perguruan Tinggi
7.	Kesenjangan ekonomi antar wilayah perdesaan dan kecamatan masih tinggi	Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis ekonomi, DTW potensial dan langka belum dikelola, infrastruktur wilayah untuk konektivitas Bali Utara dan Selatan, potensi desa belum optimal, kesenjangan antara kaya dan miskin	Beberapa dusun yang agak jauh lokasinya dari pusat desa; dan desa yang agak jauh dari pusat-pusat ekonomi	Dinas PUPR, Disparda, Distan Buleleng, Disperindag, Diskop & UKM, DLH Buleleng, Bappedalitban, LSM Lingkungan, Perguruan Tinggi
C	ISU-ISU SOSIAL BUDAYA			
1.	Lunturnya kearifan lokal karena meningkatnya pengaruh budaya asing	Persaingan SDM global, budaya gotong royong, interaksi masyarakat kurang, jumlah dan kapasitas lembaga sosial masih rendah, konflik adat (tanah adat), konflik identitas (<i>clan</i>), konflik batas desa, memudarnya eksistensi kearifan lokal dalam membendung perilaku generasi muda, kurang rasa hormat anak-anak terhadap orang tua, penggunaan baju adat bagi remaja, memudarnya kecintaan terhadap budaya sendiri, pengaruh teknologi yang negatif, proteksi pengaruh budaya luar masih lemah, penyuluhan bidang sosial	Seluruh wilayah kabupaten, utamanya generasi muda	Dinas Kebudayaan, Disdikpora, Dinas Sosial, Bagian Kesra, Bappedalitbang, DLH, LSM lingkungan, Perguruan Tinggi
2.	Pertumbuhan penduduk masih	Akurasi database penduduk rendah,	Di perkotaan Seririt dan	Disdukcapil, Dinas KBPP,



No	Isu Strategis	Isu-Isu Terkait	Lokasi Isu	Pemangku Kepentingan Terkait
(1)	(2)	(3)	(2)	(4)
	cukup tinggi dan persebaran penduduk tidak merata	Penduduk pendatang, kualitas pelayanan administrasi penduduk rendah, penyebaran penduduk tidak merata, program KB menurun	Singaraja	Dinas Sosial, Bappedalitbang, DLH, LSM Lingkungan, Perguruan Tinggi
3.	Penanganan Kemiskinan dan penangguran belum optimal	Bantuan masyarakat miskin bersifat parsial, Daya beli masyarakat masih rendah, harga pangan tidak stabil, kemiskinan/rumah tangga miskin meningkat, kesempatan kerja terbatas, ketrampilan hidup, tingkat pengangguran tinggi, kesenjangan antara kaya dan miskin, kesenjangan pendidikan di desa		Disdukcapil, Disnaker, Dinas Sosial, Bappedalitbang, DLH, LSM Lingkungan, Perguruan Tinggi
4.	PMKS dan Pelayanan Sosial	Banyaknya bunuh diri, KDRT, kebutuhan dasar PMKS, kekerasan terhadap anak, kenakalan remaja, penanganan eks pengungsi Timtim, penanganan masalah PSK terselubung, penanganan PMKS belum optimal, penyakit masyarakat, penyalahgunaan narkoba, penyandang masalah PMKS masih tinggi, rumah singgah belum tersedia	Seluruh wilayah kabupaten	Dinas Sosial, Bagian Ksera, Disdikpora, Disnaker, Bappedalitbang, DLH, LSM Lingkungan, Perguruan Tinggi
5.	Pelestarian Budaya belum optimal	Jumlah dan kapasitas lembaga sosial, menurunnya ketaatan masyarakat terhadap awig-awig, pelestarian budaya masih rendah, pelestarian keanekaragaman hayati untuk ritual masih rendah, pelestarian situs sejarah, pembinaan	Seluruh wilayah kabupaten	Dinas Kebudayaan, Disdikpora, Dinas Sosial, Bagian Kesra, Bappedalitbang, DLH, LSM lingkungan, Perguruan Tinggi



No	Isu Strategis	Isu-Isu Terkait	Lokasi Isu	Pemangku Kepentingan Terkait
(1)	(2)	(3)	(2)	(4)
		sanggar seni, pengaruh teknologi yang negative, penghargaan kepada seniman, proteksi pengaruh budaya luar masih lemah, Tri Hita Karana		
6.	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum optimal	Penyuluhan bidang sosial, perilaku hidup bersih dan sehat masih rendah, ruang publik perkotaan	Seluruh wilayah kabupaten, khususnya kawasan permukiman kumuh atau padat penduduk	Dinkes, Disdikpora, Dinas Sosial, Bagian Kesra, Bappedalitbang, DLH, LSM lingkungan, Perguruan Tinggi
7.	Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan belum optimal	Budaya baca siswa, kesenjangan pendidikan di desa, komunikasi informasi dan edukasi sosial, penyebaran penduduk tidak merata, persaingan SDM	Beberapa wilayah desa yang terpisah cukup jauh dari pusat desa	Dinkes, Disdikpora, Dinas Sosial, Bagian Kesra, Bappedalitbang, DLH, LSM lingkungan, Perguruan Tinggi

Sumber data: hasil FGD Pokja dan Pemangku Kepentingan

Kebutuhan pendukung isu-isu strategis adalah kecukupan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, baik berupa media cetak, *browsing* internet dan data-data yang diperoleh dari berbagai pemangku kepentingan. Data dikumpulkan dan dilakukan verifikasi menurut jenis isu-isu strategis dilaksanakan oleh Pokja PL, untuk dapat memenuhi kepentingan dalam menyusun *base line*, yang dapat disajikan di bawah ini.



Tabel 3.4
Kebutuhan Data dan/atau Informasi untuk Penyusunan *Baseline*
***Data* dalam rangka KLHS Penyusunan Rancangan RPJMD**
Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

ISU-ISU STRATEGIS	DATA YANG DIPERLUKAN	INSTANSI SUMBER DATA
ISU-ISU LINGKUNGAN		
Menurunnya kondisi daerah aliran sungai (DAS)	Data kondisi DAS di wilayah Kabupaten Buleleng	BPS, Bappedalitbang, BPDAS-LH Unda Anyar
	Alih fungsi lahan pertanian produktif	BPS, Dinas Pertanian (Distan) Kab. Buleleng
	Lahan kritis	Dishut Provinsi Bali
	Potensi bencana alam	BPBD Buleleng
	Perambahan hutan	Dishut Provinsi Bali
	Data-data cuaca/iklim	BMKG Bali, Distan Kab. Buleleng
	Data erosi	Distan Kab. Buleleng, Bappedalitbang, Perguruan Tinggi
Pencemaran lingkungan oleh air limbah	Persentase Rumah Tangga memiliki jamban menurut kecamatan tahun 2012-2016	Dinas Kesehatan Kab. Buleleng
	Persentase Jamban yang memiliki <i>septic tank</i> menurut kecamatan tahun 2012-2016	Dinas Kesehatan Kab. Buleleng
	Jumlah dan kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja : lokasi, kapasitas dan sarana pengangkutan	Dinas Perkimta Kab. Buleleng
	Data IPAL Komunal (SANIMAS) : lokasi, jumlah KK dan jiwa yang dilayani	Dinas Perkimta Kab. Buleleng
	Jenis-jenis dan jumlah usaha/kegiatan industri penghasil limbah cair di Kab. Buleleng tahun 2016	DLH Kabupaten Buleleng
	Data hasil pemantauan kualitas air sungai tahun 2010-2014	DLH Kabupaten Buleleng
	Rumah Tangga yang ber-PHBS menurut	Dinas Perkimta Kab. Buleleng



ISU-ISU STRATEGIS	DATA YANG DIPERLUKAN	INSTANSI SUMBER DATA
	Kecamatan tahun 2012-2016	
	Buku Profil Kesehatan Kabupaten Buleleng	Dinas Kesehatan Kab. Buleleng
Sanitasi lingkungan belum memadai, terutama karena pengelolaan persampahan yang belum optimal	Data cakupan pelayanan persampahan Data Sanitasi Lingkungan	DLH Kab. Buleleng Dinas Perkimta Kabupaten Buleleng
Kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang dan padang lamun	Data abrasi pantai, Data kerusakan terumbu karang	Dinas Perikanan Kab. Buleleng; Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali
Ancaman perubahan iklim	Data alih fungsi lahan pertanian, Data bencana alam, Data kondisi DAS, lahan kritis, Data limbah Data perubahan iklim, RTH Perkotaan, Data kerusakan hutan	DLH Kab. Buleleng, Distan Kab. Buleleng, BPBD Kab. Buleleng, Dinas PUPR Kab. Buleleng, Dinas Kehutanan Prov. Bali, BPDAS-HL Unda Anyar
ISU-ISU EKONOMI		
Rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat, terutama generasi muda Kewirausahaan	Data Pencari Kerja Data Pengusaha Muda	Disnaker Kab. Buleleng
Daya saing UMKM masih rendah	Data UMKM	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Buleleng
Kondisi ekonomi perdesaan belum mampu mencegah migrasi tenaga kerja produktif ke wilayah perkotaan ataupun ke luar daerah	Data Pengembangan ekonomi Pedesaan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Buleleng
Pendapatan perkapita penduduk masih rendah dan belum merata	Data Pendapatan Perkapita Penduduk	Bagian Ekonomi Setda Buleleng; Bappeda Kab. Buleleng; Dinas Statistik Kab. Buleleng
Iklim investasi belum kondusif	Data Perkembangan Investasi	DPMPPTSP Kab. Buleleng
Kondisi infrastruktur kawasan strategis belum	Data Infrastruktur Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Buleleng



ISU-ISU STRATEGIS	DATA YANG DIPERLUKAN	INSTANSI SUMBER DATA
optimal		
Kesenjangan ekonomi antar wilayah perdesaan dan kecamatan masih tinggi	Data perkapita perkotaan dan Pedesaan	Bappedalitbang Kab. Buleleng, Dinas statistik Kab. Buleleng
ISU-ISU SOSIAL BUDAYA		
Lunturnya kearifan lokal karena meningkatnya pengaruh budaya asing	Data budaya local	Dinas Kebudayaan Kab. Buleleng
Pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi dan persebaran penduduk tidak merata	Data Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk	Disdukcapil Kabupaten Buleleng; Dinas Statistik Kab. Buleleng
Penanganan Kemiskinan dan pengangguran belum optimal	Data penduduk Miskin	Bappeda Kab. Buleleng, Dinas Sosial Kab.
	Data Pengangguran Daya serap tenaga kerja	Buleleng, Dinasaker Kab. Buleleng
PMKS dan Pelayanan Sosial	Data PMKS Data Potensi Sumber Kesejahteraan sosial (PSKS)	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
Pelestarian Budaya belum optimal	Data Subak	Dinas Kebudayaan Kab. Buleleng, Dinas Statistik Kab. Buleleng, Dinas Kab. Buleleng
	Data Kelompok Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Kab. Buleleng, Dinas Statistik Kab. Buleleng
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum optimal	Data PHBS	Dinas Perkimta Kab. Buleleng dan Dinkes Kab. Buleleng
Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan belum optimal	Data Kesehatan (Pelayanan Kesehatan, AHH, Angka Kematian Ibu dan Bayi, Air Minum Berkelanjutan, Sanitas)	Dinas Kesehatan Kab. Buleleng; Dinas Statistik Kab. Buleleng
	Data bidang Pendidikan (RLS, APS, HLS dan AMH)	Disdikpora Kabupaten Buleleng



3.3 Tahap Pengkajian

Tahapan Pengkajian dilaksanakan terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng selama 5 (lima) tahun yang dirancang dalam bentuk RPJMD. Kegiatan ini dilakukan Pokja PL dengan meneliti, mengidentifikasi serta mengkaji keterkaitan antar waktu, keterkaitan antar sektor, dan keterkaitan antar pemangku kepentingan. Pengkajian juga dilakukan untuk memastikan aspek keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, serta aspek keadilan yaitu keadilan antar kelompok masyarakat maupun keadilan antar generasi dapat direfleksikan dalam rancangan RPJMD. Pokja PL melakukan pengkajian pengaruh indikasi program prioritas dalam rancangan RPJMD. Pengkajian ini berlandaskan telaah akademis yang dibantu dengan hasil analisis *baseline data*, bertujuan untuk :

- 1 Memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah yang sedang disusun telah mengakomodir kebijakan yang lebih tinggi;
- 2 Memastikan bahwa kebijakan dan/atau program pembangunan yang sedang disusun telah mengarusutamakan aspek lingkungan hidup dan pembangunan keberlanjutan;
- 3 Memastikan bahwa telah dipertimbangkan upaya pencegahan dan/atau penanggulangan terhadap potensi dampak/pengaruh negatif program-program pembangunan terhadap isu-isu strategis yang menjadi muatan KLHS

Berdasarkan atas pendekatan di atas, pengkajian pada pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 terdiri dari dua aspek yaitu :

- a. Pengkajian prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu keterkaitan, keseimbangan dan keadilan dalam rancangan RPJMD, mencakup:



- 1) Kajian **keterkaitan** kebijakan pembangunan daerah Buleleng baik visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan dalam Rancangan RPJMD meliputi keterkaitan antar waktu, antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan
- 2) Kajian **keseimbangan** kebijakan pembangunan daerah meliputi uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, dan strategi dan arah kebijakan dalam Rancangan RPJMD berkenaan keseimbangan antar kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup.
- 3) Kajian **keadilan** kebijakan pembangunan daerah yang tersajikan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran, dan strategi dan arah kebijakan pada Rancangan RPJMD meliputi keadilan antar kelompok masyarakat dan keadilan antar generasi.

Berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dilakukan kajian KLHS terhadap RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, menjadi tujuh (7) kajian sebagai berikut:

1. Kajian keterkaitan kebijakan pembangunan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan kebijakan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;
2. Kajian keterkaitan kebijakan pembangunan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017;
3. Kajian keterkaitan kebijakan pembangunan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan kebijakan pembangunan dalam RPJMN Tahun 2015-2019;
4. Kajian keterkaitan kebijakan pembangunan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan kebijakan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018;



5. Kajian keterkaitan antar wilayah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan terhadap kebijakan pembangunan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022;
6. Kajian keseimbangan antar kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup terhadap kebijakan pembangunan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022;
7. Kajian keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi terhadap kebijakan pembangunan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

b. Pengkajian pengaruh indikasi program prioritas dalam Rancangan RPJMD

Dalam rangka untuk memperoleh gambaran mengenai potensi pengaruh atau dampak dari pelaksanaan program-program pembangunan dalam Rancangan RPJMD terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan, dilakukan melalui Kajian pengaruh indikasi program prioritas dalam Rancangan RPJMD. Proses kajian pengaruh diawali dengan melakukan penapisan program-program prioritas dalam Rancangan RPJMD yang mempunyai potensi pengaruh positif maupun pengaruh negatif atau netral terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan. Penapisan ini menggunakan metode matriks *check list*.

Berbagai program pembangunan yang disusun melalui RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, dapat memiliki potensi berdampak negatif terhadap berbagai isu-isu strategis yang berkembang dalam proses KLHS, hal ini dapat memperparah keadaan isu-isu lingkungan dari kajian isu-isu strategis pembangunan. Berdasarkan kajian ilmiah dan dukungan data yang akurat, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Muatan pengkajian pengaruh menggunakan satu atau lebih dari enam instrumen kajian yang dimuat



dalam Pasal 16 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, yakni :
1) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; 2) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; 3) kinerja layanan/jasa ekosistem; 4) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 5) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan 6) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pengkajian pada pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dilakukan beberapa kali rapat kerja POKJA-PL dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan yang hadir dan terlibat dalam proses pengkajian ini sangat representatif yang berasal kalangan perguruan tinggi, perwakilan dunia usaha, perwakilan lembaga adat dan agama, perwakilan instansi pemerintah pusat di daerah, Organisasi Pemerintah Daerah dan perwakilan masyarakat/himpunan profesi dan lain sebagainya.

3.3.1 Pengkajian Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022

3.3.1.1 Pengkajian Keterkaitan Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 dengan RPJPD Kabupaten Buleleng 2005-2025

Kajian keterkaitan kebijakan Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 dengan RPJPD Kabupaten Buleleng 2005-2025 (Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025). Untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025, yang



pada hakekatnya juga kajian dilakukan untuk dapat memastikan bahwa kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng yang sedang disusun secara konsisten dan memiliki keterkaitan dengan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. Kajian ini dalam rangka pelaksanaan amanat UU Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Pasal 5 ayat (2) yang mengamanatkan bahwa: *“RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif”*

RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 merupakan pelaksanaan tahap ketiga RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025. Pada RPJMD tahap III ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian berlandaskan keunggulan daerah, sumber daya alam, berbasis wilayah dan sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan penguasaan dan penerapan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Kajian keterkaitan kebijakan pembangunan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 dengan RPJPD Kabupaten Buleleng 2005-2025 meliputi uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan. Hasil kajian selengkapnya disajikan pada **Lampiran 2**.



a. Kajian Keterkaitan Uraian Visi RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 dengan Visi RPJPD Kabupaten Buleleng 2005-2025

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih di mana penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah, uraian visi pembangunan jangka menengah daerah, yang tetap berlandaskan pada mandat Undang-Undang serta mempunyai keterkaitan dengan visi pembangunan jangka panjang daerah untuk menjaga konsistensi tahapan pelaksanaan pembangunan jangka panjang di daerah. Adapun Visi RPJPD Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

**“Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya
Berlandaskan *Tri Hita Karana*”.**

Buleleng Kerta Raharja berarti Buleleng aman dan sejahtera. Mengantarkan Bali Dwipa Jaya mengandung makna Buleleng berada pada garda terdepan menuju Bali Dwipa Jaya yang merupakan Visi pembangunan daerah Provinsi Bali. Berlandaskan *Tri Hita Karana* berarti pembangunan Buleleng berlandaskan filsafat hidup masyarakat Bali. Filsafat *Tri Hita Karana* adalah filsafat harmoni yang melandasi adat dan budaya Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai Hindu. Secara harafiah *Tri Hita Karana* berarti tiga unsur yang menyebabkan kebahagiaan. Tiga unsur itu adalah, *parhyangan* yang maknanya hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, *pawongan* yang bermakna hubungan manusia dengan sesama manusia, dan *palemahan* yang bermakna hubungan manusia dengan lingkungan. Sebagai filsafat harmoni, keserasian dan keseimbangan, filsafat *Tri Hita Karana* menghendaki harmoni, keserasian, dan keseimbangan hubungan pada tiga unsur itu agar manusia dan masyarakat menjadi sejahtera dan bahagia. Filsafat itu harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat Bali agar mencapai kebahagiaan.



Penjelasan ini dalam pelaksanaan proses pembangunan di Buleleng senantiasa tahapan pembangunan harus memperhatikan keharmonisan hubungan manusia dengan keyakinan terhadap Tuhannya, harmoni antara manusia dengan sesamanya di dalam pergaulan hidup bermasyarakat, serta harmoni antara manusia dengan lingkungannya, dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya, disajikan visi RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan *Tri Hita Karana*”

1. **Mandiri** mengandung makna: kemampuan pemerintah daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. **Sejahtera** mengandung makna: terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
3. **Berdaya Saing** mengandung makna: kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
4. **Berlandaskan *Tri Hita Karana*** mengandung makna: berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

Visi ke depan yang mengandung kemandirian daerah, didukung oleh pertumbuhan ekonomi eksklusif berbasis keunggulan daerah, yang didukung oleh kemampuan sumberdaya yang berkualitas, memiliki keunggulan kooperatif dan kompetitif dalam mewujudkan nilai tambah daerah dan kemampuan daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hak dasar hidup masyarakat secara berkualitas, yang selalu berlandaskan pada *tri hita karana*.



Dengan demikian Hasil kajian keterkaitan Uraian Visi RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan Visi RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (**Lampiran 2.a**), dapat disampaikan bahwa Uraian Visi RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 **telah** konsisten dan mempunyai keterkaitan erat dengan Visi RPJPD Kabupaten Buleleng 2005-2025. Antara Visi RPJPD sangat terkait dengan Visi RPJMD, kedua visi ini mengejar kesejahteraan yang didasari dengan filsafat hidup masyarakat Bali yaitu *tri hita karana*, yang diperkuat pada rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan kemandirian dan berdaya saing daerah.

b. Kajian Keterkaitan Rumusan Misi Pembangunan Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 dengan Misi Pembangunan RPJPD Kabupaten Buleleng 2005-2025

Selanjutnya kajian yang dilakukan terhadap keterkaitan antara Misi Pembangunan RPJPD Kabupaten Buleleng 2005-2025 dengan Keterkaitan Rumusan Misi Pembangunan Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 dapat dilakukan dengan menyampaikan terlebih dahulu tentang visi Misi Pembangunan RPJPD Kabupaten Buleleng 2005-2025.

1. Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.



3. Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.
4. Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya.
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.

Sedangkan Rumusan Misi Pembangunan Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 disajikan sebagai berikut.

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).



Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi merupakan bentuk rincian dari visi yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah, berdasarkan isu-isu strategis yang berhasil di gali dari permasalahan pembangunan daerah, dengan demikian misi seharusnya dapat berbagai isu strategis yang berkembang dan dihadapi daerah.

Hasil kajian keterkaitan dan/atau konsistensi misi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 dengan misi pembangunan RPJPD Kabupaten Buleleng 2005-2025 (**Lampiran 2.b**) menunjukkan bahwa rumusan Misi RPJMD telah mempunyai keterkaitan dengan Misi RPJPD. Uraian hasil pengkajian sebagai berikut, misi 1 dan misi 4 DPJPD terkait dengan misi 3 dan misi 6 RPJMD; misi 2 RPJPD terkait dengan misi 1, 2 dan misi 5 RPJMD; sedangkan misi 5 RPJPD berkaitan langsung dengan misi 6 RPJMD

c. Kajian Keterkaitan Uraian Sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 dengan sasaran RPJPD Kabupaten Buleleng 2005-2025

Sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 merupakan tindak lanjut dari sasaran RPJPD Kabupaten Buleleng 2005-2025, dengan menetapkan skala prioritas, sesuai dengan isu strategis yang berkembang dan pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan daerah.



Adapun yang menjadi sasaran RPJPD Kabupaten Buleleng 2005-2025 adalah:

- 1) Terwujudnya masyarakat yang unggul dan kompetitif.
- 2) Terwujudnya masyarakat Buleleng yang sejahtera.
- 3) Terwujudnya keamanan daerah dan masyarakat.
- 4) Terwujudnya kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global dengan dijiwai oleh nilai-nilai Hindu dan semangat *multicultural*.
- 5) Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Sedangkan tindak lanjut sasaran tersebut dapat diwujudkan pada beberapa sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, yaitu:

Misi. 1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, dengan 4 (empat) sasaran:

1. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
2. Meningkatnya akses dan kesempatan kerja penduduk usia kerja/produktif;
3. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin;
4. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah untuk pembiayaan pembangunan.

Misi 2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah, dengan 3 (tiga) sasaran:

1. Meningkatnya nilai produk pertanian;
2. Berkembangnya industri berbasis komoditas unggulan daerah;
3. Meningkatnya jumlah dan daya saing UMKM , serta koperasi.

Misi 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas, dengan 5 (lima) sasaran, yaitu:



1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan;
2. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga;
3. Meningkatnya status kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
5. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran.

Misi 4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Misi 5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik, dengan sasaran:

1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik

Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*), dengan sasaran:

1. Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan local;
2. Terjaganya kualitas lingkungan hidup.

Kajian keterkaitan uraian sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan sasaran RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 menunjukkan bahwa antara sasaran RPJPD dengan sasaran RPJMD memiliki keterkaitan sebagai berikut:

- 1) Sasaran pada misi 1 RPJPD terkait langsung dengan sasaran pada misi 3 RPJMD;
- 2) Sasaran pada misi 5 RPJPD terkait dengan sasaran misi 6 RPJMD;
- 3) Sasaran misi 2 RPJPD terkait dengan sasaran misi 1 RPJMD;



- 4) Sasaran pada misi 3 RPJPD terkait dengan sasaran misi 4 RPJMD;
- 5) Sasaran misi 4 RPJPD terkait dengan sasaran misi 3 dan misi 6 RPJMD.

d. Kajian Keterkaitan Arah Kebijakan Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025

Keterkaitan arah kebijakan Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (**Lampiran 2.d**) menunjukkan bahwa secara umum telah terdapat keterkaitan dan/atau konsistensi arah kebijakan RPJMD dengan RPJPD. Namun demikian terdapat beberapa kelemahan dalam penetapan arah kebijakan RPJMD yang dinilai dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Uraian hasil pengkajian sebagai berikut

- 1) Misi 1 Mewujudkan Masyarakat yang Unggul dan Kompetitif, dengan arah Misi 1 adalah pembangunan sumberdaya manusia yakni pembangunan pendidikan dan kesehatan
- 2) Misi 2 Mewujudkan Masyarakat Buleleng yang Sejahtera. Arah Misi 2 adalah pembangunan ekonomi sesuai potensi daerah
- 3) Misi 3 Mewujudkan Keamanan Daerah dan Masyarakat Buleleng, Arah Misi 3 adalah pembangunan keamanan dan ketertiban daerah dan masyarakat
- 4) Misi 4 Mewujudkan Kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global dengan dijiwai oleh nilai-nilai Hindu, Arah Misi 4 adalah pembangunan kebudayaan.
- 5) Misi 5 Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berkelanjutan Arah Misi 5 adalah pembangunan sumber daya alam dan lingkungan.



Selanjutnya dalam visi RPJMD 2017-2022 memiliki beberapa arah kebijakan sebagai berikut:

Misi Ke-1 Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, dengan arah kebijakan

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi kawasan.
2. Mempermudah investasi untuk membuka peluang kerja
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
4. Meningkatkan perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin.
5. Meningkatkan penerimaan daerah dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Misi Ke-2, Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah

1. Meningkatkan nilai produk pertanian
2. Membangun industri pengolahan berbasis komoditas produksi masyarakat
3. Mengembangkan Desa Wisata
4. Meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM dan Koperasi
5. Meningkatkan daya saing produksi masyarakat.

Misi Ke-3, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas, dengan arah kebijakan:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal.
2. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dan membudayakan olahraga.
3. Meningkatkan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat.
4. Meningkatkan integritas dan akuntabilitas aparatur.
5. Meningkatkan kualitas aparatur ASN dan kualitas pelayanan publik.



Misi Ke-4, Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan. Dengan arah kebijakan:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pembangunan.

Misi Ke-5, Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik, dengan arah kebijakan adalah memetakan kebutuhan infrastruktur dan melaksanakan pembangunan infrastruktur daerah dan Membangun infrastruktur daerah dengan kuantitas sesuai kebutuhan dan kualitas yang baik.

Misi Ke-6, Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). Dengan arah kebijakan:

1. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal.
2. Menjaga kualitas lingkungan hidup.

Setelah dilaksanakan pengkajian Keterkaitan arah kebijakan Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025, menunjukkan adanya keterkaitan antara arah kebijakan RPJPD dengan RPJMD, sebagai berikut:

- 1) Arah Kebijakan RPJPD pembangunan pendidikan dan kesehatan berkaitan dengan arah kebijakan RPJMD pada misi 3.
- 2) Arah Kebijakan RPJPD ke-2, pembangunan ekonomi sesuai potensi daerah terkit dengan arah kebijakan pada misi 1 dan 2 RPJMD.
- 3) Arah Kebijakan RPJPD ke-3 berkaitan dengan arah kebijakan misi 4 RPJMD terkit dengan keterlibatan pemangku kepentingan.



- 4) Arah Kebijakan RPJPD ke-4 terkit dengan arah kebijakan dari misi 3 RPJMD.
- 5) Arah Kebijakan RPJPD pembangunan sumberdaya dan lingkungan berkaitan dengan arah kebijakan pada misi 6 RPJMD.

3.3.1.2 Pengkajian Keterkaitan Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 dengan RPJMN 2015-2019

Penyusunan RPJMD disamping berpedoman pada RPJPD juga diamanatkan oleh UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional agar memperhatikan RPJM Nasional guna menjaga keterkaitan dan/atau konsistensi kebijakan dan/atau program pembangunan dalam RPJMD dengan agenda pembangunan jangka menengah nasional, sebagaimana tertuang dalam RPJMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ditetapkan berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dalam KLHS ini dilakukan kajian keterkaitan kebijakan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan beberapa kebijakan RPJMN yaitu Agenda Prioritas Nasional yang dikenal dengan sebutan Nawa Cita, arah kebijakan pembangunan nasional, strategi pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, dan agenda pembangunan wilayah.

a. Kajian Keterkaitan Uraian Visi RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 dengan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita)

Pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 memiliki visi yaitu: ***Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong***. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. *Mewujudkan* keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan



sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan

2. *Mewujudkan* masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. *Mewujudkan* politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. *Mewujudkan* kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. *Mewujudkan* bangsa yang berdaya saing.
6. *Mewujudkan* Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. *Mewujudkan* masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam upaya mewujudkan ketujuh visi di atas, Pemerintah Pusat memiliki Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.



9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kajian keterkaitan misi pembangunan jangka menengah daerah dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 dengan Agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita) (**Lampiran 3.a**) menunjukkan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Buleleng belum seluruhnya terdapat keterkaitan dan/atau konsistensi dengan Agenda Nawa Cita. Konsistensi keterkaitan antara Agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita) dengan Misi RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 sebagai berikut.

1. Nawa Cita 1, khususnya memberi rasa aman bagi seluruh warga Negara belum secara implisit dijawab pada Misi RPJMD. Keterkaitan tersebut semestinya tampak kuat pada Misi 6, yaitu Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan.
2. Nawa Cita 2, 4 dan 5 terkait dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dijawab dengan misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas.
3. Nawa Cita 3 belum kuat keterkaitannya dengan Misi RPJMD, khususnya pembangunan desa.
4. Nawa Cita 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bias maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya terkait kuat dengan Misi 1 dan 2 RPJMD.
5. Nawa Cita 7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik berkaitan dengan Misi 2 RPJMD.
6. Nawa Cita 8 melakukan revolusi karakter bangsa kuat keterkaitannya dengan Misi 6 RPJMD.



7. Nawa Cita 9 belum kuat keterkaitannya dengan Misi RPJMD, khususnya memperteguh kebinekaan.

b. Kajian Keterkaitan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 dengan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2015-2019

Mengacu pada berbagai pertimbangan Isu Strategis Nasional, maka disusun arah Kebijakan RPJMN 2015-2019, sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
- 2 Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan
- 3 Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan
- 4 Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim
- 5 Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh
- 6 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
- 7 Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah

Kajian keterkaitan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dalam RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah nasional menunjukkan bahwa pada umumnya arah kebijakan RPJMD telah terdapat keterkaitan yang erat dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah nasional. Namun demikian terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang perlu diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah nasional (**Lampiran 3.b**). Adapun keterkaitan arah kebijakan



pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah nasional sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan pada Misi Ke-1, yaitu Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, berkaitan Arah Kebijakan RPJMN 1 Pertumbuhan Ekonomi Eksklusif. Dan arah kebijakan RPJMN 2 berkaitan dengan Meningkatkan nilai tambah produk daerah
2. Misi Ke-2, Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah, arah kebijakan RPJMD berkaitan dengan arah kebijakan RPJMN 2
3. Arah Kebijakan pada Misi Ke-3, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas, berkaitan dengan arah kebijakan RPJMN 5 dan 6
4. Arah kebijakan pada Misi Ke-4, Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan, berkaitan dengan arah kebijakan pada misi 1
5. Arah kebijakan pada Misi Ke-5, Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik, berkaitan dengan arah kebijakan RPJMN 7
6. Arah kebijakan Misi Ke-6, Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*), berkaitan dengan arah kebijakan RPJMN ke 6

c. Kajian Keterkaitan Strategi RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan Strategi Pengarusutamaan Berkelanjutan Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2015-2019

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu kebijakan pembangunan nasional sebagai penjabaran atau pelaksanaan mandat peraturan perundang-undangan dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pengarusutamaan



pembangunan berkelanjutan, baik berkelanjutan ekonomi, sosial maupun lingkungan, diharapkan diperhatikan dan dijabarkan pula ke dalam rencana pembangunan daerah Jangka Panjang Daerah maupun Jangka Menengah Daerah. Pengkajian keterkaitan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan menjadi muatan penting dalam KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan daerah.

Sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun pembangunan nasional dalam periode 2015-2019 adalah:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk mendukung kemandirian ekonomi, keberlanjutan kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah.
2. Meningkatkan penerapan peduli alam dan lingkungan dalam pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang tercermin pada membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).
3. Membaiknya tata kelola pembangunan berkelanjutan, yang tercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik, serta menurunnya tingkat korupsi

Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJMN 2015-2019, dapat disebutkan sebagai berikut:

Arah Kebijakan 1 : Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan ekonomi, melalui strategi:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terus terjaga secara positif dengan pengurangan kesenjangan antar wilayah;



2. Peningkatan tingkat pendapatan (per kapita) serta pengurangan kesenjangan pendapatan antar kelompok;
3. Peningkatan lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran menurun;
4. Penurunan tingkat kemiskinan sehingga jumlah penduduk miskin berkurang;
5. Ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga sehingga tingkat inflasi rendah;
6. Ketahanan energi, utamanya peningkatan akses masyarakat terhadap energi, peningkatan efisiensi dan bauran energi nasional;
7. Peningkatan akses transportasi/mobilitas masyarakat;
8. Penerapan pola produksi/kegiatan ekonomi dan pola konsumsi hemat (tidak boros) dan ramah lingkungan.

Arah Kebijakan 2 : Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan sosial, melalui strategi:

1. Peningkatan kesetaraan gender untuk akses/kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan keterwakilan perempuan dalam organisasi;
2. Peningkatan keterjangkauan layanan dan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat;
3. Peningkatan keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horisonal dan rendahnya tingkat kriminalitas;
4. Peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk;
5. Peningkatan pelaksanaan demokrasi (indek demokrasi);
6. Pengendalian kekerasan terhadap anak, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).



Arah Kebijakan 3 : Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup, melalui strategi:

1. Peningkatan kualitas air, udara dan tanah yang tercermin dalam peningkatan skor IKLH;
2. Penurunan emisi GRK;
3. Penurunan tingkat deforestasi dan kebakaran hutan, meningkatnya tutupan hutan (*forest cover*) serta penjagaan terhadap keberadaan keanekaragaman hayati;
4. Pengendalian pencemaran laut, pesisir, sungai, dan danau;
5. Pemeliharaan terhadap sumber-sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS), 6. Pengurangan limbah padat dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Kajian keterkaitan strategi pembangunan jangka menengah daerah dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 (**Lampiran 3.c**) menunjukkan bahwa strategi pembangunan dalam RPJMD telah terdapat keterkaitan dengan strategi pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan akan tetapi masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu disempurnakan untuk memperkuat pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng. Uraian kajian keterkaitan tersebut sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJMN 1 berkaitan dengan Strategi Pembangunan dalam Rancangan RPJMD pada misi 1 dan 2, namun belum nampak ketegasan terkait dengan arah menurunkan jumlah kemiskinan.
2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJMN 2 berkaitan dengan Strategi Pembangunan dalam Rancangan RPJMD pada misi 3.



3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJMN 1 berkaitan dengan Strategi Pembangunan dalam Rancangan RPJMD pada misi 6.

d. Kajian Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan Agenda Pembangunan wilayah dalam RPJMN Tahun 2015-2019

Isu Utama pembangunan wilayah nasional masih adanya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Bali menjadi salah satu penopang pertumbuhan pembangunan nasional yang berkembang sebagai lumbung pangan dan pusat-pusat industri, terutama yang berkaitan dengan sektor pariwisata, harus tetap dapat menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi nasional, dengan selalu mengkaitkan program-program pembangunan nasional.

Kebijakan dan Strategi Prioritas Agenda pembangunan Wilayah RPJMN 2015-2019.

- a. Kebijakan dan strategi prioritas yang ditempuh dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat Pembangunan Desa yaitu : 1) Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota, dengan strategi prioritas :



- Peningkatan pembangunan di bidang agropolitan
 - Peningkatan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar.
 - Peningkatan peran lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi, BUMDesa, dan lembaga ekonomi mikro lainnya dalam pengembangan ekonomi perdesaan.
- b. Kebijakan dan strategi prioritas yang ditempuh dalam Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa yaitu :
- 1) Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, dengan strategi prioritas :
 - Mengembangkan sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian
 - Meningkatkan akses desa-desa produksi menuju pusat pertumbuhan dan simpul-simpul transportasi, pengembangan pasar, dan toko sarana dan prasarana produksi
 - Membangun bank pertanian dan perikanan untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha di sektor pertanian dan perikanan.
 - Mengembangkan *Techno Park* berbasis pertanian dan perikanan rakyat yang mendukung penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan jasa.
 - 2) Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi kepada keterkaitan desa-kota, dengan strategi prioritas :
 - Mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yang efisien.
 - Meningkatkan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah



- Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan kerjasama antar pemerintah-swasta dalam tata kelola ekonomi lokal
- Mengembangkan forum dialog antar stakeholder yang mendorong perwujudan kerjasama
- Mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuat, kemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal di sektor pertanian dan perikanan
- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengenai kelestarian daerah resapan serta mitigasi bencana

Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi prioritas pembangunan wilayah RPJMN Tahun 2015-2019 telah secara konsisten dikembangkan dan direncanakan dalam strategi dan arah pembangunan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, meliputi: 1) menyeimbangkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian dengan arah kebijakan: meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif; 2) mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis kawasan dan komoditas mengembangkan aksesibilitas pemasaran, dengan arah kebijakan: meningkatkan nilai produk pertanian, kegiatan ekonomi berbasis kawasan dan komoditas; 3) mengembangkan aksesibilitas pemasaran, dengan arah kebijakan: membangun industri pengolahan berbasis komoditas produksi masyarakat dan menguatkan, serta memfasilitasi penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi. Kajian ini dapat dilihat pada **lampiran 3**.



3.3.1.3 Pengkajian Keterkaitan Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018

a. Kajian Keterkaitan Uraian Visi RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan Visi RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018

Diharapkan Rencana pembangunan di Kabupaten/kota di Bali selaras dengan Visi dan Misi Pembangunan yang ada di Provinsi Bali. Demikian juga RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 hendaknya memiliki keselarasan dengan visi, misi, strategi dan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Bali, yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018. Visi pembangunan Bali Tahun 2013-2018 adalah:

BALI YANG MAJU, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA

1. **Bali maju:** Bali yang dinamis, Bali yang terus bergerak maju menurut dinamika pergerakan dan perkembangan dunia
 - Maju dengan tetap menjunjung kesucian dan keiklasan demi tegaknya dharma.
 - Maju harus tetap “metakshu” yang senantiasa meningkatkan kualitas dirinya sebagai daerah tujuan wisata yang handal, berkhарisma dan religius.
 - Modern menurut ukuran dan tuntutan nilai-nilai universal yang tidak menyimpang dan atau bertentangan dengan nilai-nilai agama Hindu serta adat istiadat Bali.
2. **Bali aman:** Bali yang “dabdad” teratur sekala niskala terhindar dari ancaman intervensi virus-virus ideologi yang bertentangan dengan Tri Hita Karana (seperti terorisme, anarkisme dan virus *non traditional threat* lainnya)



3. **Bali damai:** Bali yang diselimuti atmosfer kesejukan lahir bathinserta selalu dalam tradisi “*tis*” dan kondusif, suasana “*briyak-briyuk, pakedek pakenyem*”
4. **Bali sejahtera:** Bali yang “*sukerta sekala niskala*” sebagai diperolehnya kemajuan, keamanan dan kedamaian yang sejati.

Selanjutnya dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022, visi yang hendak dicapai adalah “Terwujudnya masyarakat Buleleng Yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan *tri hita karana*”. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara visi RPJMD Provinsi Bali dengan visi RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022. Dapat dijelaskan sebagai berikut: Visi RPJMD Provinsi Bali “Bali Maju” dan tercerminkan pada pada visi 1 dan 3, yaitu Buleleng mandiri dan berdaya saing; Visi 2 Bali aman dan Bali Damai pada visi 3 terlaksana pada visi 4 hubungan yang harmoni berlandaskan *trihita karana*; Visi 4 Bali sejahtera sangat terkait dengan visi 3 RPJMD, yaitu sejahtera.

b. Kajian Keterkaitan Uraian Misi RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan Misi dengan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018

Dalam mewujudkan misi pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Bali tahun 2013-2018 ditempuh 3 (tiga) misi pembangunan yaitu : 1) Mewujudkan Bali yang berbudaya, metakshu, dinamis, maju dan modern; 2) Mewujudkan Bali yang aman, damai, tertib, harmonis, serta bebas dari berbagai ancaman dan 3) Mewujudkan Bali yang sejahtera dan sukerta lahir bathin.

Hasil kajian keterkaitan dan/atau konsistensi misi pembangunan Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 dengan misi pembangunan RPJPD Provinsi Bali tahun 2013-2018 (**Lampiran 4.b**) menunjukkan bahwa rumusan Misi RPJMD Kabupaten mempunyai



keterkaitan dengan Misi RPJMD Provinsi Bali akan tetapi masih terdapat kelemahan. Uraian hasil pengkajian sebagai berikut: Misi 1: Bali yang berbudaya keterkaitannya dengan visi 3 dari RPJMD Kabupaten; Misi 2 Bali aman, tertib dan aman, harmonis terkait dengan visi 4 dan 6 RPJMD Kabupaten; Misi 3 Bali sejahtera dan sukertha terkait dengan visi 1 dan 2 RPJMD Kabupaten. Dalam upaya mewujudkan visi keamanan belum nampak jelas pada misi RPJMD Kabupaten Buleleng, sehingga seakan tidak ada konsistensi dengan visi RPJMD Provinsi Bali, terutama dalam upaya mewujudkan keamanan Bali, dalam kajian ini direkomendasikan agar perwujudan keamanan dalam misi RPJMD diwujudkan.

3.3.1.4 Pengkajian Keterkaitan Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 dengan dengan RPJMD Kabupaten Buleleng 2012-2017

RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, hendaknya merupakan kelanjutan dari RPJMD tahun sebelumnya (RPJMD Tahun 2012-2017) yang dapat berupa penambahan rencana pembangunan dari isu strategis yang ditemukan, serta merupakan peningkatan kualitas dari proses pembangunan pada RPJMD sebelumnya, yang dapat disempurnakan dari rumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

a. Kajian Keterkaitan Uraian Visi RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan Visi RPJMD Kabupaten Buleleng 2012-2017

Visi RPJMD Kabupaten Buleleng 2012-2017 adalah “Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Damai dan Lestari Berlandaskan *“Tri Hita Karana”* dengan penjelasan sebagai berikut:

1) **Mandiri**, diukur dengan:



- Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah yang berbasis kinerja.
- Terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good and Clean Governance*): profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN.
- Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat.
- Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan dan kemajuan pembangunan daerah.
- Meningkatnya partisipasi/swadaya masyarakat dalam memenuhi sendiri kebutuhan pokok.
- Terwujudnya pariwisata berbasis budaya dan keindahan alam yang unik, serta bersinergi dengan sektor pertanian.

2) **Sejahtera**, diukur dengan :

- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditunjukkan oleh:
 - ✓ Tingkat Pendidikan antara lain: terlaksananya wajib belajar 12 tahun, meningkatnya jumlah penduduk berpendidikan tinggi, menurunnya tingkat pendidikan terendah, meningkatnya angka partisipasi sekolah, dan tersedianya tenaga siap pakai melalui pendidikan kejuruan.
 - ✓ Tingkat Kesehatan antara lain: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, angka harapan hidup dan terpenuhinya sistem pelayanan sosial melalui Asuransi Kesehatan.
 - ✓ Kemampuan daya beli masyarakat ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan riil per kapita.
- Berkurangnya jumlah penduduk miskin, pengangguran terbuka dan kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan sosial.



- Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi, dan kesempatan berusaha).
 - Berkembangnya keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.
 - Tersedianya jaringan Infrastruktur yang mampu mendorong perekonomian perdesaan.
- 3) **Damai**, diukur dengan:
- Teraktualisasinya keragaman budaya lokal.
 - Terjaminnya kebebasan beribadah.
 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan supremasi hukum.
- 4) **Lestari**, diukur dengan:
- Terkelolanya lingkungan hidup dan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan.
 - Terpeliharanya adat istiadat dan nilai-nilai budaya Bali sebagai pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat.
 - Terwujudnya lingkungan permukiman yang berlandaskan kearifan lokal.
 - Terwujudnya Penggunaan ruang dan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022 sebagian besar merupakan kelanjutan dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2012-2017. Visi RPJMD Kabupaten Buleleng 2012-2017 berkaitan dengan visi RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022, terutama pencapaian visi mandiri, sejahtera, damai dan lestari, diperkuat dengan rancangan visi daya saing daerah pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.



b. Kajian Keterkaitan Uraian Misi RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan Misi RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017

Rumusan misi Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan misi RPJMD Kabupaten Buleleng 2012-2017, terlihat masih terkait erat dan merupakan keberlanjutan dari misi pembangunan sebelumnya, kecuali misi ke 6 RPJMD Tahun 2012-2017, yaitu memperkuat dimensi keadilan di semua bidang, nampak belum terumuskan dalam rancangan RPJMD Tahun 2017-2022. Belum diketahui apakah perwujudan visi tersebut telah tercapai pada periode sebelumnya, atau tersirat pada isi dari 6 misi RPJMD Tahun 2017-2022. Adapun misi RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 adalah:

- 1) Percepatan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi, merata dan berkualitas;
- 2) Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah;
- 3) Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas yang profesional, berbudaya dan bermoral;
- 4) Menumbuhkembangkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan pembangunan;
- 5) Pelestarian budaya Bali yang ditumbuhkembangkan pada masyarakat;
- 6) Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang;
- 7) Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berkelanjutan (*sustainable*).

Berdasarkan kajian keterkaitan misi Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 dengan misi RPJMD Kabupaten Buleleng 2012-2017 dapat dijelaskan bahwa satu sama lain sudah terkait erat, yaitu: misi 1 RPJMD 2012-2017 berkait erat dengan misi 1 RPJMD 2017-2022; misi 2 RPJMD 2012-2017 berkaitan erat dengan misi 2 RPJMD 2017-2022;



misi 3 RPJMD 2012-2017 terkait erat dengan misi 3 RPJMD 2017-2022; misi 4 RPJMD 2012-2017 berkaitan dengan misi 4 RPJMD 2017-2022; serta misi 5 dan 6 RPJMD 2012-2017 berkaitan erat dengan misi 6 RPJMD 2017-2022.

c. Kajian Keterkaitan Uraian Sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017

Tujuh misi yang dirumuskan dalam RPJMD tahun 2012-2017 dirumuskan lebih lanjut dalam 20 sasaran pembangunan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan;
2. Meningkatnya penanaman modal baik asing maupun dalam negeri
3. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk unggulan daerah;
5. Meningkatnya daya saing produk-produk unggulan daerah di pasaran;
6. Terwujudnya struktur prekonomian yang tangguh berbasis unggulan daerah;
7. Meningkatnya kuantitas pendidikan;
8. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
9. Meningkatnya profesionalisme dan kemandirian Aparatur Pemerintah;
10. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
11. Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan;
12. Tumbuhnya rasa memiliki di kalangan pemangku kepentingan;
13. Meningkatnya peran pemangku kepentingan dalam pengendalian pembangunan;



14. Meningkatnya apresiasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal yang adiluhung;
15. Tumbuh dan berkembangnya kesenian berbasis budaya Bali;
16. Tegaknya supremasi hukum, ketentraman dan keadilan di semua aspek kehidupan;
17. Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan sosial;
18. Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan
19. Terjaganya kualitas sumber daya alam;
20. Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan meningkatnya pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Kajian menunjukkan bahwa misi dari RPJMD Tahun 2017-2022 sudah konsisten dengan misi RPJMD Tahun 2012-2017. Demikian juga dengan sasaran pembangunan pada kedua RPJMD tersebut, namun terdapat sedikit perubahan pada peningkatan kualitas pendidikan yang sebelumnya hanya mengejar kuantitas. Dibidang pemanfaatan energi terbarukan tidak lagi dirumuskan pada RPJMD Tahun 2017-2022, hal ini harus diberikan penjelasan, apakah hal ini sudah tercapai atau pencapaiannya sasaran ini sebelumnya sulit untuk diukur, atau dicapai.

d. Kajian Keterkaitan Uraian Aarah Kebijakan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017

Dalam RPJMD tahun 2012-2017, terdapat agenda prioritas yang dikenal dengan program (12 PAS), disertai misi, strategi dan arah pembangunan sebagai berikut:

1. Percepatan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi, merata dan berkualitas, dengan strategi pembangunan:
 - Menumbuhkan kembangkan prekonomian berbasis masyarakat.
 - Meningkatkan infrastruktur penunjang pembangunan ekonomi.



- Pemetaan potensi dan promosi investasi daerah.
 - Peningkatan penyerapan tenaga kerja.
2. Meningkatkan infrastruktur penunjang pembangunan ekonomi
Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah, dengan strategi pembangunan :
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan.
 - Meningkatkan penanganan panen dan pasca produksi dalam rangka peningkatan daya saing.
 - Pemetaan dan pengembangan struktur prekonomian yang berbasis unggulan daerah.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas yang profesional, berbudaya dan bermoral. Dengan strategi pembangunan:
- Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan pemerataan pendidikan di semua jenjang.
 - Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatann sampai ke pelosok desa.
 - Meningkatkan profesionalisme dan kemandirian aparatur pemerintah.
 - Penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, transparan , akutabel dan jujur.
4. Menumbuhkembangkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan pembangunan, dengan strategi pembangunan:
- Meningkatkan koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan.
 - Meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam pengendalian pembangunan.
5. Pelestarian budaya Bali yang ditumbuhkembangkan pada masyarakat, dengan strategi pembangunan :



- Meningkatkan penggalian, pengembangan dan pelestarian kebudayaan Bali yang adiluhung.
 - Meningkatkan penggalian, pengembangan dan pelestarian kesenian berbasis budaya Bali.
6. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang, dengan strategi pembangunan:
- Meningkatkan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.
 - Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.
 - Pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan.
7. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berkelanjutan (*sustainable*), dengan strategi pembangunan:
- Pengembangan pembangunan sesuai peruntukan ruang dan berwawasan lingkungan.
 - Peningkatan kualitas penanggulangan bencana.
 - Pengembangan energi terbarukan dan ramah lingkungan.

Dari hasil kajian terhadap RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Buleleng 2012-2017, sebagian besar misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 merupakan tindak lanjut dari misi, strategi dan arah kebijakan dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017. Misi, strategi dan arah strategi 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 RPJMD Tahun 2012-2017 ada keterkaitan dengan misi, strategi dan arah kebijakan 1-6 visi dan arah strategi RPJMD Tahun 2017-2022. Namun pada misi 6 RPJMD 2012-2017 tidak konsisten dirumuskan pada RPJMD 2017-2022; Juga pada arah dan strategi berkaitan dengan visi 6 Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang pada RPJMD Tahun 2012-2017, meliputi supremasi hukum dan pengarusutamaan gender



tidak terumuskan lagi pada RPJMD Tahun 2017-2022; serta pada misi 7 RPJMD 2012-2017, strategi berkaitan penanganan bencana dan energi terbarukan tidak dirumuskan pada RPJMD Tahun 2017-2022. Dengan demikian tidak ada jaminan keberlanjutan pelaksanaan terhadap misi dan arah kebijakan tersebut, sehingga perlu dirumuskan kembali dalam bentuk sasaran dan program pembangunan.

3.3.1.5 Pengkajian Keterkaitan Antar Wilayah, Antar Sektor dan Antar Pemangku Kepentingan Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

Kajian keterkaitan antar wilayah bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) yang disusun telah mempertimbangkan dan memasukkan pola-pola pembangunan terpadu antar wilayah baik antar wilayah kecamatan, antar wilayah desa dan kota, dan antar daerah hulu dan hilir dalam rangka mengatasi kesenjangan pembangunan. Kajian keterkaitan antar sektor bertujuan untuk memastikan bahwa KRP yang disusun telah menunjukkan keterpaduan antar sektor dalam mengatasi permasalahan pembangunan yang kompleks dan lintas sektor. Sedangkan kajian keterkaitan antar pemangku kepentingan bertujuan untuk memastikan bahwa KRP yang disusun telah melibatkan pemangku kepentingan dalam mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan mengingat pembangunan tidak dapat hanya dijalankan oleh pemerintah. Kajian keterkaitan antar wilayah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 meliputi uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, dan strategi dan arah kebijakan.



a. Kajian Keterkaitan Antar Wilayah, Antar Sektor dan Antar Pemangku Kepentingan Uraian Visi Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 20017-2022

Kajian keterkaitan antar wilayah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan Uraian Visi (**Lampiran 6.a**) menunjukkan bahwa Uraian Visi **Buleleng tri hita karana**, telah menunjukkan keterkaitan antar wilayah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan. Uraian hasil kajian sebagai berikut:

1. Uraian visi telah menunjukkan keterkaitan antar wilayah, keterkaitan antar wilayah tercermin dalam uraian **Tri Hita Karana**. Konsep ini dapat menjembatani harmoni dan keseimbangan pembangunan antar wilayah baik antar kecamatan, kota dan desa, serta desa dengan desa lainnya.
2. Uraian visi telah menunjukkan keterkaitan antar sektor. keterkaitan antar sektor tercermin dalam uraian mandiri, sejahtera, berdaya saing, dan *Tri Hita Karana*. Adanya dukungan antar sektor, memperkuat pencapaian kemandirian pada sektor tertentu, demikian juga dalam mencapai kesejahteraan, dan peningkatan daya saing, yang berlandaskan pada konsep *Tri Hita Karana*.
3. Uraian visi telah menunjukkan keterkaitan antar Pemangku Kepentingan keterkaitan antar Pemangku Kepentingan tercermin pada uraian daya saing dan **Tri Hita Karana**. Hubungan yang harmoni antara berbagai pemangku kepentingan dapat mewujudkan pembangunan yang bersinergi, dalam upaya meningkatkan daya saing daerah yang didukung oleh partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam hubungan yang harmoni dapat mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat.

b. Kajian Keterkaitan Antar Wilayah, Antar Sektor dan Antar Pemangku Kepentingan Rumusan Misi Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 20017-2022



Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan akan lebih jelas memahami penggambaran visi yang ingin dicapai telah mendasari dan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk keterkaitan antar wilayah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan.

Kajian keterkaitan antar wilayah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan rumusan Misi (**Lampiran 6.b**) menunjukkan bahwa Misi pembangunan secara keseluruhan telah menunjukkan keterkaitan antar wilayah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan. Uraian hasil kajian sebagai berikut:

- 1 Keterkaitan antar wilayah tercermin pada misi 1 dan Misi 5. Misi 1 yaitu Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, melalui pengembangan ekonomi kawasan. Sedangkan Misi 5 yaitu Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik, yang mana layanan publik tersebar dari tingkat kota, kecamatan sampai pada tingkat desa
- 2 Keterkaitan Antar Sektor tercermin pada Misi 2 dan Misi 5. Misi 2 yaitu Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah. yang menyangkut pengembangan sektor pertanian, komoditas unggulan, pariwisata dan produk masyarakat.
- 3 Keterkaitan Antar Pemangku Kepentingan tercermin pada **Misi 4**. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan. Dalam upaya mewujudkan sinergitas dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan.



c. Kajian Keterkaitan Antar Wilayah, Antar Sektor dan Antar Pemangku Kepentingan Tujuan dan Sasaran Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 20017-2022

Kajian keterkaitan antar wilayah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2017-2022 (**Lampiran 6.c**) menunjukkan bahwa perumusan tujuan dan sasaran pembangunan secara keseluruhan sudah mendasari dan mengintegrasikan keterkaitan antar antar wilayah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan.

d. Kajian Keterkaitan Antar Wilayah, Antar Sektor dan Antar Pemangku Kepentingan strategi dan Arah Kebijakan Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 20017-2022

Strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berisi pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan akan membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah.

Kajian keterkaitan antar wilayah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan rumusan strategi dan arah kebijakan (**Lampiran 6.d**) dalam penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 menunjukkan bahwa perumusan tujuan dan sasaran pembangunan secara keseluruhan **sudah baik, dapat** mendasari dan mengintegrasikan keterkaitan antar antar wilayah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan. Perencanaan pembangunan yang bersifat “*overall planning*” dan mendorong partisipasi masyarakat sebagai tenaga



pokok pembangunan sebagaimana konsep perencanaan pembangunan semesta berencana. Uraian hasil kajian selengkapnya sebagai berikut

1. Keterkaitan Antar wilayah dapat tercermin pada strategi dan arah kebijakan misi 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi kawasan.; strategi dan arah kebijakan pada misi 2, pengembangan ekonomi kawasan; pada misi 3 berkenaan dengan akses pendidikan dan kesehatan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; misi 5 pembangunan infrastruktur pelayanan publik diseluruh wilayah, dan misi 6, pengembangan pembangunan berbasis lingkungan sesuai peruntukan tata ruang.
2. Keterkaitan antar sektor tercermin pada strategi dan arah kebijakan pada misi 2 menyangkut sektor pertanian, wisata, UMKM, produksi masyarakat; misi 3 menyangkut pembangunan sosial dan budaya
3. Keterkaitan Antar Pemangku Kepentingan, tercermin pada strategi dan arah kebijakan misi 2 menyangkut masyarakat, pelaku wisata, UMKM; misi 4 Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan.

3.3.1.6 Pengkajian Keseimbangan Kepentingan Lingkungan, Sosial Budaya dan Ekonomi Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022

Kajian prinsip keseimbangan dalam KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa KRP yang disusun telah mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan sosial budaya dan kepentingan lingkungan hidup. Prinsip ini penting untuk dilandasi dalam penyusunan KRP agar perencanaan pembangunan di suatu wilayah/daerah tidak cenderung mengacu pada pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan lingkungan hidup sosial dan budaya atau sebaliknya. Sehingga dengan demikian dapat dihindari terjadinya krisis lingkungan, ekses negatif dan disharmoni sosial yang dapat



mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi itu sendiri.

a. Kajian Keseimbangan Kepentingan Lingkungan, Sosial Budaya dan Ekonomi Uraian Visi Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022

Visi pembangunan Rancangan RPJMD 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang mandiri, Sejahtera, dan berdaya Saing Berlandaskan *Tri Hita Karana*”. Hasil kajian keseimbangan uraian Visi pembangunan tersebut (**Lampiran 7.a**) menunjukkan bahwa uraian Visi pembangunan telah menunjukkan keseimbangan antara kepentingan lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Uraian hasil kajian sebagai berikut.

1. Uraian visi telah menunjukkan Kepentingan Lingkungan pada uraian sejahtera, berdaya saing dan *tri hita karana*.
2. Keseimbangan Kepentingan Sosial Budaya, tercermin pada uraian mandiri, sejahtera, berdaya saing dan *tri hita karana*.
3. Keseimbangan Kepentingan Ekonomi tercermin pada uraian mandiri, sejahtera, berdaya saing dan *tri hita karana*.

b. Kajian Keseimbangan antar Kepentingan Lingkungan Sosial, Budaya dan Ekonomi dalam Uraian Misi Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

Visi yang menyangkut kepentingan keseimbangan antara kepentingan lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi adalah *tri hita karana* yang diwujudkan dalam 6 (enam) misi), yaitu:

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;



4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Hasil kajian keseimbangan rumusan misi pembangunan **harus** menunjukkan keseimbangan antara kepentingan lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Meskipun misi pembangunan telah mencerminkan kepentingan lingkungan, sosial budaya dan ekonomi, tetap dalam penyusunan strategi, arah kebijakan harus dirumuskan, untuk tidak terjadi ketidak berimbangan program kepentingan lingkungan dan budaya kurang berimbang dengan kepentingan sosial dan ekonomi. Uraian hasil kajian (**Lampiran 7.b**) sebagai berikut: 1) Rumusan misi pembangunan telah menunjukkan kepentingan lingkungan pada misi ke 6; 2) Rumusan misi pembangunan telah menunjukkan kepentingan sosial dan budaya tercermin pada misi 3 dan 6; dan 3) Rumusan misi pembangunan telah menunjukkan kepentingan ekonomi tercermin pada misi 1, 2, 5 dan 6.

c. Kajian Keseimbangan antar Kepentingan Lingkungan Sosial, Budaya dan Ekonomi Tujuan dan Sasaran Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

Hasil kajian keseimbangan rumusan tujuan dan sasaran pembangunan telah menunjukkan keseimbangan antara kepentingan lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Kepentingan lingkungan dan budaya belum terumuskan secara teknokratik untuk menjaga keseimbangannya dengan kepentingan ekonomi dan sosial. Uraian hasil kajian (**Lampiran 7.c**) sebagai berikut.



1. Rumusan tujuan dan sasaran telah mencerminkan kepentingan lingkungan pada misi 6, dengan tujuan terjaganya kualitas lingkungan hidup.
2. Rumusan tujuan dan sasaran telah mencerminkan kepentingan sosial dan budaya pada misi 3 berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan layanan publik dan pada misi 6 pembangunan berkelanjutan.
3. Rumusan tujuan dan sasaran telah mencerminkan kepentingan ekonomi tercermin pada tujuan dan arah kebijakan misi 1 dan misi 2.

Rumusan tujuan dan sasaran telah mencerminkan kepentingan lingkungan, sosial budaya dan ekonomi, namun perwujudan keseimbangan sebagai uraian atas pencapaian keimbangan berlandaskan *tri hita karana* belum tercermin secara tegas untuk menjamin keseimbangan antara pembangunan lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi.

d. Kajian Keseimbangan antar Kepentingan Lingkungan Sosial, Budaya dan Ekonomi Strategi dan Arah Kebijakan Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

Hasil kajian keseimbangan rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan **telah** menunjukkan keseimbangan antara kepentingan lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Uraian hasil kajian (**Lampiran 7.d**) sebagai berikut.

1. Strategi dan arah kebijakan telah mencerminkan kepentingan lingkungan tercermin pada misi 6;
2. Strategi dan arah kebijakan telah mencerminkan kepentingan sosial budaya pada misi 3, misi 4, misi 5 dan 6;
3. Strategi dan arah kebijakan telah mencerminkan kepentingan ekonomi tertuang pada strategi dan arah kebijakan misi 1, visi 2, dan misi 5.



Dengan demikian rumusan strategi dan arah kebijakan telah mencerminkan kepentingan lingkungan, sosial budaya dan ekonomi, namun dalam program-program prioritas pembangunan harus tercerminkan secara konsisten kepentingan lingkungan sosial, budaya dan ekonomi secara berimbang.

3.3.1.7 Pengkajian Keadilan Antar Kelompok Masyarakat dan Antar Generasi Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

Kajian prinsip keadilan dalam KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa KRP yang disusun telah mempertimbangkan keadilan antar kelompok masyarakat untuk terlibat dan memperoleh manfaat dari pembangunan atau pelaksanaan pembangunan berdampak terhadap marginalisasi terhadap sekelompok masyarakat. Disamping itu KLHS juga bertujuan untuk memastikan bahwa KRP yang disusun telah mempertimbangkan keadilan antar generasi, di mana pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dapat direncanakan dan diimplementasikan tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi aspirasi dan kebutuhan hidupnya.

Kebijakan dan program pembangunan berkeadilan meliputi : (1) kebijakan dan program pembangunan pro-rakyat, (2) kebijakan dan program pembangunan keadilan untuk semua (*justice for all*), dan (3) kebijakan dan program pembangunan dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*).

a. Kajian Keadilan Antar Kelompok Masyarakat dan Antar Generasi Uraian Visi Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

Visi pembangunan Rancangan RPJMD 2017-2022 yaitu Buleleng Yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan *tri hita karana*.



Hasil kajian prinsip keadilan uraian Visi pembangunan (**Lampiran 8.a**) menunjukkan bahwa uraian Visi pembangunan telah memenuhi prinsip keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi. Uraian hasil kajian sebagai berikut:

- 1) Uraian visi telah mencerminkan keadilan antar kelompok masyarakat tercermin pada uraian kata sejahtera, berlandaskan *tri hita karana*.
- 2) Uraian visi telah mencerminkan keadilan antar generasi dapat terlihat pada uraian visi sejahtera, berdaya saing, mandiri dan berlandaskan *tri hita karana*.

b. Kajian Keadilan Antar Kelompok Masyarakat dan Antar Generasi Rumusan Misi Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

Hasil kajian prinsip keadilan terhadap rumusan misi pembangunan telah memenuhi prinsip keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi. Uraian hasil kajian (**Lampiran 8.b**) sebagai berikut:

- 1) Rumusan misi telah mencerminkan adanya keadilan antar kelompok masyarakat dapat terlihat pada semua misi RPJMD
- 2) Rumusan misi pada RPJMD telah mencerminkan keadilan antar generasi, hal ini dapat terlihat terutama pada misi 1 ekonomi inklusif, yang menyatakan tidak satupun generasi terabaikan, misi 2 menyangkut ekonomi kerakyatan, dan misi 4 terkait sinergitas pemangku kepentingan.

c. Keadilan Antar Kelompok Masyarakat dan Antar Generasi Rumusan Tujuan dan Sasaran Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

Hasil kajian prinsip keadilan terhadap rumusan tujuan dan sasaran pembangunan (**Lampiran 8.c**) menunjukkan bahwa rumusan tujuan



dan sasaran sudah memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkeadilan. Uraian hasil kajian sebagai berikut.

- 1) Uraian Tujuan dan Sasaran Rancangan RPJMD telah mencerminkan keadilan antar kelompok masyarakat, pada semua misi
- 2) Uraian Tujuan dan Sasaran Rancangan RPJMD telah mencerminkan keadilan antar generasi misi 1, misi 3, misi 5 dan misi 6.

d. Kajian Antar Kelompok Masyarakat dan Antar Generasi Strategi dan Arah Kebijakan Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

Hasil kajian prinsip keadilan terhadap rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan (**Lampiran 8.d**) menunjukkan bahwa rumusan strategi dan arah kebijakan telah cukup komprehensif memenuhi prinsip pembangunan berkeadilan. Uraian hasil kajian sebagai berikut:

- 1) Uraian Strategi dan Arah Kebijakan Rancangan RPJMD telah mencerminkan keadilan antar kelompok masyarakat pada semua misi
- 2) Uraian Strategi dan Arah Kebijakan Rancangan RPJMD telah mencerminkan keadilan antar generasi tercermin pada semua misi

3.3.2 Identifikasi Program RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yang Berpotensi Menimbulkan Pengaruh terhadap Kondisi Lingkungan Hidup

Kajian pengaruh dilakukan untuk mendapatkan gambaran perkiraan atau potensi pengaruh atau dampak dari pelaksanaan program prioritas terhadap isu-isu strategis yang telah disepakati pada tahap pelingkupan. Proses kajian pengaruh diawali dengan melakukan penapisan program-program prioritas dalam Rancangan RPJMD yang akan dikaji. Penapisan dilakukan dengan metode *check list* untuk melihat keterkaitan antara daftar program prioritas dengan isu-isu strategis, meliputi:



- Program yang memiliki potensi pengaruh/dampak positif terhadap lingkungan hidup.
- Program yang memiliki potensi pengaruh/dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- Program yang tidak memiliki keterkaitan dengan lingkungan hidup.

Program-program yang memiliki potensi pengaruh/dampak positif terhadap lingkungan hidup menunjukkan adanya kontribusi yang baik terhadap kondisi lingkungan hidup kedepannya. Sedangkan program-program yang memiliki potensi pengaruh/dampak negatif terhadap lingkungan hidup selanjutnya dilakukan pengkajian pengaruhnya atau implikasinya lebih lanjut jika program tersebut diimplementasikan.

Kajian potensi pengaruh negatif program-program dalam Rancangan RJPMD terhadap kondisi lingkungan hidup berdasar penilaian ilmiah serta ditunjang oleh data dan informasi yang akurat, bersifat kuantitatif dan kualitatif. Muatan pengkajian pengaruh menggunakan satu atau lebih dari tujuh kemungkinan dampak/risiko sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 15 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH yakni:

- 1) perubahan iklim;
- 2) kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- 3) peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- 4) penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- 5) peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- 6) peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- 7) peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Penapisan kajian pengaruh program RPJMD yang mempunyai dampak/risiko terhadap kondisi lingkungan hidup disajikan pada



Lampiran 9. Dari matriks penapisan Lampiran 9 tersebut diperoleh program-program pembangunan yang memiliki potensi dampak/risiko positif terhadap kondisi lingkungan hidup dan program-program pembangunan yang memiliki potensi dampak/risiko negatif terhadap kondisi lingkungan hidup. Program-program yang memiliki potensi dampak positif tidak dilakukan analisis lebih lanjut karena merupakan program yang dapat diimplementasikan tanpa harus ada rekomendasi penyempurnaan. Sedangkan program-program yang memiliki potensi dampak/risiko negatif dilakukan analisis lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 16 PP Nomor 46 Tahun 2016. Program-program yang memiliki potensi dampak/risiko negatif terhadap lingkungan hidup seperti tersaji pada **Tabel 3.5**.

Berdasarkan penapisan yang dilakukan diperoleh hasil bahwa dari 313 program yang tercantum pada Bab VII Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yang dikaji, terdapat 12 program yang memiliki potensi dampak/risiko negatif terhadap lingkungan, dengan jumlah dampak/risiko negatif berkisar 1-5 buah. Dengan demikian 12 program tersebut dilanjutkan pengkajiannya.



Tabel 3.5
Program RPJMD yang Berpotensi Memiliki Dampak/Risiko
Terhadap Lingkungan Hidup

No.	Program RPJMD	Kriteria Dampak/Risiko Lingkungan							Jumlah Negatif
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Program pembangunan jalan dan jembatan	-	-	0	-	+	+	+	3
2.	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	0	0	+	-	-	+	+	2
3.	Program pengembangan perumahan	-	-	-	-	-	+	+	5
4.	Program peningkatan iklim dan realisasi investasi	-	-	0	-	-	+	-	5
5.	Program pengembangan perikanan budidaya	-	+	0	-	-	+	0	3
6.	Program pengembangan kawasan perikanan budidaya	0	-	0	-	0	+	0	2
7.	Program pengembangan perikanan tangkap	0	-	0	-	0	+	0	2
8.	Program pengembangan destinasi pariwisata	+	+	-	0	-	+	0	2
9.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan (tanaman pangan)	-	0	0	-	0	+	0	2
10.	Program peningkatan produksi hortikultura	-	0	0	-	0	+	0	2
11.	Program peningkatan produksi perkebunan	+	+	+	+	-	+	+	1
12.	Program peningkatan produksi hasilpeternakan	-	0	0	-	0	+	-	3

Keterangan :

- 1) perubahan iklim;
- 2) kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- 3) peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- 4) penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- 5) peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- 6) peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- 7) peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.



3.3.3 Kajian Pengaruh Indikasi Program Prioritas RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 terhadap Isu-isu Strategis Lingkungan Hidup

Kajian pengaruh dilakukan untuk mendapatkan gambaran perkiraan atau potensi pengaruh atau dampak dari pelaksanaan program prioritas terhadap isu-isu strategis yang telah disepakati pada tahap pelingkupan. Proses kajian pengaruh diawali dengan melakukan penapisan program-program prioritas dalam Rancangan RPJMD yang akan dikaji. Penapisan dilakukan dengan metode *check list* untuk melihat keterkaitan antara daftar program prioritas dengan isu-isu strategis, meliputi:

- Program yang memiliki potensi pengaruh/dampak positif dengan isu-isu strategis.
- Program yang memiliki potensi pengaruh/dampak negatif terhadap isu-isu strategis.
- Program yang tidak memiliki keterkaitan dengan isu strategis.

Program-program yang memiliki potensi pengaruh/dampak positif terhadap sejumlah isu strategis menunjukkan sudah adanya usaha untuk mengatasi permasalahan/isu-isu strategis. Program-program yang memiliki potensi pengaruh/dampak negatif terhadap isu-isu strategis tertentu selanjutnya dilakukan pengkajian pengaruhnya atau implikasinya lebih lanjut jika program tersebut diimplementasikan.

Kajian potensi pengaruh negatif program-program prioritas dalam Rancangan RJPMD terhadap isu-isu strategis berdasar penilaian ilmiah serta ditunjang oleh data dan informasi yang akurat, bersifat kuantitatif dan kualitatif. Muatan pengkajian pengaruh menggunakan satu atau lebih dari enam kajian yang dimuat dalam Pasal 16 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH yakni:

- 1) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;



- 2) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- 3) kinerja layanan/jasa ekosistem;
- 4) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- 5) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
dan
- 6) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Penapisan kajian pengaruh program prioritas terhadap isu-isu strategis disajikan pada **Tabel 3.6**. Dari matriks penapisan tersebut diperoleh program-program pembangunan yang memiliki potensi pengaruh positif terhadap isu-isu strategis dan program-program pembangunan yang memiliki potensi pengaruh negatif terhadap isu-isu strategis.

3.3.3.1 Program-Program Prioritas yang Mempunyai Potensi Pengaruh Positif terhadap Isu-Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Program-program yang mempunyai pengaruh positif terhadap isu strategis berarti bahwa program-program tersebut berkontribusi terhadap penanganan isu-isu strategis dalam lima tahun ke depan. Permasalahannya adalah (1) apakah program-program tersebut sudah cukup memadai untuk penanganan isu-isu strategis, dan (2) bagaimana mengefektifkan implementasi program-program tersebut agar isu-isu strategis dapat ditangani secara komprehensif. Adapun program-program yang mempunyai potensi pengaruh positif terhadap isu-isu strategis sebagai berikut :

a. Isu-Isu Lingkungan

1. Menurunnya kondisi daerah aliran sungai (DAS)

Menurunnya kondisi DAS merupakan salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dan keprihatinan masyarakat luas di Bali, khususnya di Buleleng. Dari 12 program prioritas yang memiliki



potensi dampak/risiko negatif terhadap lingkungan yang dikaji, tidak ada program yang memiliki potensi pengaruh positif terhadap isu-isu strategis.

2. Pencemaran lingkungan oleh air limbah

Dari 12 program prioritas yang memiliki potensi dampak/risiko negatif terhadap lingkungan yang dikaji, tidak ada yang memiliki potensi pengaruh positif terhadap isu-isu strategis.

3. Sanitasi lingkungan belum memadai, terutama karena pengelolaan persampahan yang belum optimal

Dari 12 program prioritas yang memiliki potensi dampak/risiko negatif terhadap lingkungan yang dikaji, tidak ada yang memiliki potensi pengaruh positif terhadap isu-isu strategis.

4. Kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang dan padang lamun

Dari 12 program prioritas yang memiliki potensi dampak/risiko negatif terhadap lingkungan yang dikaji, tidak ada yang memiliki potensi pengaruh positif terhadap isu-isu strategis.

5. Ancaman perubahan iklim

Dari 12 program prioritas yang memiliki potensi dampak/risiko negatif terhadap lingkungan yang dikaji, tidak ada yang memiliki potensi pengaruh positif terhadap isu-isu strategis.

b. Isu-Isu Ekonomi

1. Rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat, terutama generasi muda

Dari 12 program prioritas yang memiliki potensi dampak/risiko negatif terhadap lingkungan yang dikaji, terdapat 11 program



prioritas yang berkontribusi positif terhadap penanganan isu Rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat, terutama generasi muda. Program-program tersebut meliputi program-program di bidang pekerjaan umum, penanaman modal, perikanan, pariwisata, dan pertanian. Program tersebut adalah: (1) program pembangunan jalan dan jembatan, program pembangunan infrastruktur perdesaan, program peningkatan iklim dan realisasi investasi, program pengembangan perikanan budidaya, program pengembangan kawasan budidaya perikanan, program pengembangan perikanan tangkap, program pengembangan destinasi wisata, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan (tanaman pangan), program peningkatan produksi hortikultura, program peningkatan produksi perkebunan, dan program peningkatan hasil peternakan.

Program-program tersebut dinilai telah cukup memadai dalam mengatasi permasalahan rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat, terutama generasi muda.

2. Daya saing UMKM masih rendah

Terdapat 11 program prioritas yang berkontribusi positif terhadap penanganan isu daya saing UMKM masih rendah. Program-program tersebut meliputi program-program yang berkaitan dengan program pembangunan jalan dan jembatan, program pembangunan infrastruktur perdesaan, program peningkatan iklim dan realisasi investasi, program pengembangan perikanan budidaya, program pengembangan kawasan budidaya perikanan, program pengembangan perikanan tangkap, program pengembangan destinasi wisata, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan (tanaman pangan), program peningkatan produksi hortikultura,



program peningkatan produksi perkebunan, dan program peningkatan produksi hasil peternakan.

Telah terdapat banyak program pembangunan yang ditujukan untuk mengelola isu Daya saing UMKM masih rendah. Program-program agropolitan dan minapolitan, serta Program Pengembangan Taman Teknologi Pertanian dapat menjadi program andalan dalam peningkatan daya saing produk pertanian yang didukung dengan Program pengembangan IPTEK dan desiminasinya di bidang industri kecil.

3. Kondisi ekonomi perdesaan belum mampu mencegah migrasi tenaga kerja produktif ke wilayah perkotaan ataupun ke luar daerah

Dari 12 program prioritas yang berpotensi memiliki dampak/risiko negatif terhadap lingkungan, seluruhnya berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap penanganan isu kondisi ekonomi perdesaan belum mampu mencegah migrasi tenaga kerja produktif ke wilayah perkotaan ataupun ke luar daerah. Program-program tersebut meliputi program-program di bidang pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, penanaman modal, perikanan, pariwisata, dan pertanian. Program-program tersebut meliputi program-program yang berkaitan dengan program pembangunan jalan dan jembatan, program pembangunan infrastruktur perdesaan, program pengembangan perumahan, program peningkatan iklim dan realisasi investasi, program pengembangan perikanan budidaya, program pengembangan kawasan budidaya perikanan, program pengembangan perikanan tangkap, program pengembangan destinasi wisata, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan (tanaman pangan), program peningkatan produksi hortikultura,



program peningkatan produksi perkebunan, dan program peningkatan produksi hasil peternakan.

Program-program tersebut dinilai telah cukup memadai dalam mengatasi permasalahan kondisi ekonomi perdesaan belum mampu mencegah migrasi tenaga kerja produktif ke wilayah perkotaan ataupun ke luar daerah.

4. Pendapatan perkapita penduduk masih rendah dan belum merata

Dari 12 program prioritas yang berpotensi memiliki dampak/risiko negatif terhadap lingkungan, seluruhnya berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap penanganan isu pendapatan perkapita penduduk masih rendah dan belum merata. Program-program tersebut meliputi program-program di bidang pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, penanaman modal, perikanan, pariwisata, dan pertanian. Program-program tersebut meliputi program-program yang berkaitan dengan program pembangunan jalan dan jembatan, program pembangunan infrastruktur perdesaan, program pengembangan perumahan, program peningkatan iklim dan realisasi investasi, program pengembangan perikanan budidaya, program pengembangan kawasan budidaya perikanan, program pengembangan perikanan tangkap, program pengembangan destinasi wisata, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan (tanaman pangan), program peningkatan produksi hortikultura, program peningkatan produksi perkebunan, dan program peningkatan produksi hasil peternakan.

Program-program tersebut dinilai telah cukup memadai dalam mengatasi permasalahan Pendapatan perkapita penduduk masih rendah dan belum merata.



5. Iklim investasi belum kondusif

Terdapat 12 program prioritas yang berkontribusi positif terhadap penanganan isu iklim investasi belum kondusif. Program-program tersebut adalah program pembangunan jalan dan jembatan, program pembangunan infrastruktur perdesaan, program pengembangan perumahan, program peningkatan iklim dan realisasi investasi, program pengembangan perikanan budidaya, program pengembangan kawasan budidaya perikanan, program pengembangan perikanan tangkap, program pengembangan destinasi wisata, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan (tanaman pangan), program peningkatan produksi hortikultura, program peningkatan produksi perkebunan, dan program peningkatan produksi hasil peternakan.

Program-program tersebut dinilai telah cukup memadai dalam mengatasi permasalahan iklim investasi belum kondusif.

6. Kondisi infrastruktur kawasan strategis belum optimal

Terdapat 10 program prioritas yang berkontribusi positif terhadap penanganan isu kondisi infrastruktur kawasan strategis belum optimal. Program-program tersebut meliputi program-program di bidang pekerjaan umum, penanaman modal, perikanan, pariwisata, dan pertanian. Program-program tersebut meliputi : program pembangunan jalan dan jembatan, program pembangunan infrastruktur perdesaan, program peningkatan iklim dan realisasi investasi, program pengembangan kawasan budidaya perikanan, program pengembangan perikanan tangkap, program pengembangan destinasi wisata, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan (tanaman pangan), program peningkatan



produksi hortikultura, program peningkatan produksi perkebunan, dan program peningkatan produksi hasil peternakan.

Program-program tersebut dinilai telah cukup memadai dalam mengatasi permasalahan kondisi infrastruktur kawasan strategis belum optimal.

7. Kesenjangan ekonomi antar wilayah perdesaan dan kecamatan masih tinggi

Dari 12 program prioritas yang memiliki potensi dampak/risiko negatif terhadap lingkungan hidup yang dikaji, ada 10 program prioritas yang berkontribusi positif terhadap penanganan isu kesenjangan ekonomi antar wilayah perdesaan dan kecamatan masih tinggi. Program-program tersebut meliputi program-program di bidang pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, penanaman modal, perikanan, pariwisata, dan pertanian. Program-program tersebut meliputi : program pembangunan jalan dan jembatan, program pembangunan infrastruktur perdesaan, program pengembangan perumahan, program peningkatan iklim dan realisasi investasi, program pengembangan perikanan budidaya, program pengembangan destinasi wisata, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan (tanaman pangan), program peningkatan produksi hortikultura, program peningkatan produksi perkebunan, dan program peningkatan produksi hasil peternakan.

Program-program tersebut dinilai telah cukup memadai dalam mengatasi permasalahan kesenjangan ekonomi antar wilayah perdesaan dan kecamatan masih tinggi.



c. Isu-isu Sosial Budaya

1. Lunturnya kearifan lokal karena meningkatnya pengaruh budaya asing

Program-program yang memiliki potensi pengaruh positif terhadap isu strategis ini yaitu (1) program peningkatan produksi pertanian/perkebunan (tanaman pangan), program peningkatan produksi hortikultura, program peningkatan produksi perkebunan.

Program-program di atas dinilai telah memadai dalam menangani isu Lunturnya kearifan lokal karena meningkatnya pengaruh budaya asing.

2. Pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi dan persebaran penduduk tidak merata

Dari 12 program prioritas yang memiliki potensi dampak/risiko negative terhadap lingkungan yang dikaji, ada 1 program yang memiliki potensi pengaruh positif terhadap isu strategis ini yaitu program pengembangan destinasi pariwisata. Dengan demikian 11 program lainnya dinilai belum memadai untuk menangani permasalahan Pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi dan persebaran penduduk tidak merata. Untuk itu, dibutuhkan program-program yang berkaitan dengan pengendalian penduduk pendatang secara terpadu.

3. Penanganan Kemiskinan dan penangguran belum optimal

Dari 12 program prioritas yang berpotensi memiliki dampak/risiko negatif terhadap lingkungan, seluruhnya berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap penanganan isu penanganan kemiskinan dan penangguran belum optimal. Program-program tersebut meliputi program-program di bidang pekerjaan umum, perumahan dan



permukiman, penanaman modal, perikanan, pariwisata, dan pertanian. Program-program tersebut meliputi program-program yang berkaitan dengan program pembangunan jalan dan jembatan, program pembangunan infrastruktur perdesaan, program pengembangan perumahan, program peningkatan iklim dan realisasi investasi, program pengembangan perikanan budidaya, program pengembangan kawasan budidaya perikanan, program pengembangan perikanan tangkap, program pengembangan destinasi wisata, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan (tanaman pangan), program peningkatan produksi hortikultura, program peningkatan produksi perkebunan, dan program peningkatan produksi hasil peternakan.

Program-program tersebut diatas dinilai telah memadai dalam upaya penanganan masalah kemiskinan. Namun demikian, memperhatikan kompleksitas isu kemiskinan maka penanganan kemiskinan perlu didukung dengan program koordinasi penanganan kemiskinan dan program-program lintas bidang penanggulangan kemiskinan.

4. PMKS dan pelayanan sosial

Program-program yang memiliki potensi pengaruh positif terhadap isu strategis ini yaitu pembangunan jalan dan jembatan, program pembangunan infrastruktur perdesaan, program pengembangan perumahan, program peningkatan iklim dan realisasi investasi, program pengembangan destinasi wisata, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan (tanaman pangan), program peningkatan produksi hortikultura, program peningkatan produksi perkebunan, dan program peningkatan produksi hasil peternakan.



Program-program di atas dinilai telah memadai dalam menangani isu PMKS dan pelayanan sosial. Isu strategis ini masih membutuhkan dukungan Program penegakan peraturan perundang-undangan.

5. Pelestarian budaya belum optimal

Terdapat 7 program prioritas yang memiliki potensi pengaruh positif terhadap isu strategis ini yaitu program pembangunan jalan dan jembatan, program pembangunan infrastruktur perdesaan, program pengembangan perumahan, program peningkatan iklim dan realisasi investasi, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan (tanaman pangan), program peningkatan produksi hortikultura, dan program peningkatan produksi perkebunan.

Program-program di atas dinilai telah memadai dalam menangani isu pelestarian budaya belum optimal dengan memperkuat implementasi program-program yang berkaitan dengan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dan pemberdayaan lembaga adat dan tradisional lainnya.

6. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum optimal

Program-program yang memiliki potensi pengaruh positif terhadap isu strategis ini yaitu program pembangunan jalan dan jembatan, program pembangunan infrastruktur perdesaan, dan program pengembangan destinasi pariwisata.

Program-program di atas dinilai telah memadai dalam menangani isu Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan memperkuat implementasi program-program yang berkaitan dengan perilaku masyarakat di bidang kesehatan dan sanitasi lingkungan.



7. Mutu dan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan belum optimal. Program-program yang memiliki potensi pengaruh positif terhadap isu strategis ini yaitu program pembangunan jalan dan jembatan, program pembangunan infrastruktur perdesaan, program pengembangan perumahan, dan program peningkatan iklim dan realisasi investasi.

Program-program di atas dinilai telah memadai dalam menangani isu mutu dan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan memperkuat implementasi program-program yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

3.3.3.2 Program-Program Prioritas yang Mempunyai Potensi Pengaruh Negatif terhadap Isu-Isu Strategis

a. Isu-Isu Lingkungan

1. Menurunnya kondisi daerah aliran sungai (DAS)

Program-program RPJMD yang memiliki potensi pengaruh negatif terhadap kondisi DAS adalah program pembangunan jalan dan jembatan, program pembangunan infrastruktur perdesaan, program pengembangan perumahan, program peningkatan iklim dan realisasi investasi, program pengembangan perikanan budidaya, program pengembangan destinasi pariwisata, dan peningkatan produksi perkebunan.

Program-program tersebut dinilai kurang cukup memadai dalam mengatasi permasalahan menurunnya kondisi daerah aliran sungai (DAS).



2. Pencemaran lingkungan oleh air limbah

Program-program RPJMD yang mempunyai potensi pengaruh negatif terhadap terjadinya pencemaran lingkungan air limbah adalah program pengembangan perumahan, program peningkatan investasi dan realisasi investasi, program pengembangan perikanan budidaya, program pengembangan destinasi pariwisata, dan program peningkatan produksi hasil peternakan. Program-program tersebut dinilai kurang cukup memadai dalam mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan oleh air tanah.

3. Sanitasi lingkungan belum memadai, terutama karena pengelolaan persampahan yang belum optimal

Dari 12 program prioritas yang berpotensi memiliki dampak/risiko negatif terhadap lingkungan yang dikaji, terdapat 4 program yang mempunyai potensi pengaruh negatif terhadap isu sanitasi lingkungan. Program tersebut adalah program pengembangan perumahan, program peningkatan investasi dan realisasi investasi, program pengembangan destinasi pariwisata, dan program peningkatan produksi hasil peternakan. Program-program tersebut dinilai kurang cukup memadai dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan.

4. Kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang dan padang lamun

Dari 12 program prioritas yang berpotensi memiliki dampak/risiko negatif terhadap lingkungan yang dikaji, terdapat 5 program yang mempunyai potensi pengaruh negatif terhadap isu kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang dan padang lamun. Program tersebut adalah program peningkatan investasi dan realisasi investasi, program pengembangan perikanan budidaya, program



pengembangan kawasan budidaya perikanan, dan program pengembangan destinasi pariwisata. Program-program tersebut dinilai kurang cukup memadai dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelestarian ekosistem laut.

5. Ancaman perubahan iklim.

Dari 12 program prioritas yang berpotensi memiliki dampak/risiko negatif terhadap lingkungan yang dikaji, terdapat 9 program yang mempunyai potensi pengaruh negatif terhadap isu ancaman perubahan iklim. Program tersebut adalah program pembangunan jalan dan jembatan, program pembangunan infrastruktur perdesaan, program pengembangan perumahan, program peningkatan investasi dan realisasi investasi, program pengembangan perikanan budidaya, program pengembangan destinasi pariwisata, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan (tanaman pangan), program peningkatan produksi hortikultura, dan program peningkatan produksi perkebunan. Program-program tersebut dinilai kurang cukup memadai dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan ancaman perubahan iklim.

b. Isu-Isu Ekonomi

1. Rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat, terutama generasi muda
Dari 12 program prioritas yang memiliki potensi dampak/risiko negatif terhadap lingkungan yang dikaji, tidak ada program yang mempunyai potensi pengaruh negatif terhadap isu rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat, terutama generasi muda. Hal ini menunjukkan, program-program tersebut dinilai cukup memadai dalam mengatasi permasalahan rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat.



2. Daya saing UMKM masih rendah

Dari 12 program prioritas yang memiliki potensi dampak/risiko negatif terhadap lingkungan yang dikaji, tidak ada program yang mempunyai potensi pengaruh negatif terhadap isu daya saing UMKM masih rendah. Hal ini menunjukkan, program-program tersebut dinilai cukup memadai dalam mengatasi permasalahan daya saing UMKM di Buleleng.

3. Kondisi ekonomi perdesaan belum mampu mencegah migrasi tenaga kerja produktif ke wilayah perkotaan ataupun ke luar daerah

Dari 12 program prioritas yang memiliki potensi dampak/risiko negatif terhadap lingkungan yang dikaji, tidak ada program yang mempunyai potensi pengaruh negatif terhadap isu kondisi ekonomi perdesaan belum mampu mencegah migrasi tenaga kerja produktif ke wilayah perkotaan ataupun ke luar daerah. Hal ini menunjukkan, program-program tersebut dinilai cukup memadai dalam mengatasi permasalahan peningkatan kondisi ekonomi perdesaan.

4. Pendapatan perkapita penduduk masih rendah dan belum merata

Dari 12 program prioritas yang memiliki potensi dampak/risiko negatif terhadap lingkungan yang dikaji, tidak ada program yang mempunyai potensi pengaruh negatif terhadap isu pendapatan perkapita penduduk masih rendah dan belum merata. Hal ini menunjukkan, program-program tersebut dinilai cukup memadai dalam mengatasi permasalahan peningkatan dan pemerataan pendapatan perkapita penduduk.

5. Iklim investasi belum kondusif

Tidak terdapat program dari 12 program prioritas yang memiliki potensi dampak/risiko negatif terhadap lingkungan yang dikaji mempunyai potensi pengaruh negatif terhadap isu iklim investasi



yang belum kondusif. Hal ini menunjukkan, program-program tersebut dinilai cukup memadai dalam mengatasi permasalahan peningkatan iklim investasi di Kabupaten Buleleng.

6. Kondisi infrastruktur kawasan strategis belum optimal

Dari 12 program prioritas yang memiliki potensi dampak/risiko negatif terhadap lingkungan yang dikaji, tidak ada program yang mempunyai potensi pengaruh negatif terhadap isu kondisi infrastruktur kawasan strategis belum optimal. Hal ini menunjukkan, program-program tersebut dinilai cukup memadai dalam mengatasi permasalahan peningkatan kondisi infrastruktur di kawasan strategis.

7. Kesenjangan ekonomi antar wilayah perdesaan dan kecamatan masih tinggi

Dari 12 program prioritas yang memiliki potensi dampak/risiko negatif terhadap lingkungan yang dikaji, tidak ada program yang mempunyai potensi pengaruh negatif terhadap isu kesenjangan ekonomi antar wilayah perdesaan dan kecamatan masih tinggi. Hal ini menunjukkan, program-program tersebut dinilai cukup memadai dalam mengatasi permasalahan kesenjangan ekonomi antar wilayah perdesaan dan kecamatan di Kabupaten Buleleng.

c. Isu-isu Sosial Budaya

1. Lunturnya kearifan lokal karena meningkatnya pengaruh budaya asing

Dari 12 program prioritas yang berpotensi memiliki dampak/risiko negatif terhadap lingkungan yang dikaji, terdapat 3 program yang mempunyai potensi pengaruh negatif terhadap isu lunturnya kearifan lokal karena meningkatnya pengaruh budaya asing. Program tersebut



adalah program pengembangan perumahan, program peningkatan investasi dan realisasi investasi, dan program pengembangan destinasi pariwisata. Program-program tersebut dinilai kurang cukup memadai dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan lunturnya kearifan local jika dalam implementasinya tidak dibarengi dengan upaya-upaya pelestarian budaya lokal dan peningkatan partisipasi serta dukungan masyarakat.

2. Pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi dan persebaran penduduk tidak merata

Dari 12 program prioritas yang berpotensi memiliki dampak/risiko negatif terhadap lingkungan yang dikaji, terdapat 7 program yang mempunyai potensi pengaruh negatif terhadap isu pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi dan persebaran penduduk tidak merata. Program tersebut adalah program pembangunan jalan dan jembatan, program pengembangan infrastruktur perdesaan, program pengembangan perumahan, program peningkatan investasi dan realisasi investasi, program pengembangan budidaya perikanan, program pengembangan kawasan budidaya perikanan, dan program pengembangan perikanan tangkap. Program-program tersebut dinilai kurang cukup memadai dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan pertumbuhan dan persebaran penduduk.

3. Penanganan Kemiskinan dan penangguran belum optimal

Dari 12 program prioritas yang memiliki potensi dampak/risiko negatif terhadap lingkungan yang dikaji, tidak ada program yang mempunyai potensi pengaruh negatif terhadap isu penanganan Kemiskinan dan penangguran belum optimal. Hal ini menunjukkan, program-program tersebut dinilai cukup memadai dalam mengatasi permasalahan penanganan kemiskinan dan pengangguran.



4. PMKS dan pelayanan sosial

Dari 12 program prioritas yang berpotensi memiliki dampak/risiko negatif terhadap lingkungan yang dikaji, tidak terdapat program yang mempunyai potensi pengaruh negatif terhadap isu PMKS dan pelayanan sosial. Hal ini menunjukkan, program-program tersebut dinilai cukup memadai dalam mengatasi permasalahan PMKS dan pelayanan social di Kabupaten Buleleng.

5. Pelestarian budaya belum optimal

Dari 12 program prioritas yang berpotensi memiliki dampak/risiko negatif terhadap lingkungan yang dikaji, terdapat 1 program yang mempunyai potensi pengaruh negatif terhadap isu pelestarian budaya belum optimal, yaitu program pengembangan destinasi pariwisata. Program tersebut dinilai kurang cukup memadai dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelestarian budaya jika tidak dibarengi dengan upaya-upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

6. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum optimal

Dari 12 program prioritas yang berpotensi memiliki dampak/risiko negatif terhadap lingkungan yang dikaji, terdapat 3 program yang mempunyai potensi pengaruh negatif terhadap isu PHBS belum optimal. Program tersebut adalah program pengembangan perumahan, program peningkatan investasi dan realisasi investasi, dan program peningkatan produksi hasil peternakan. Program-program tersebut dinilai kurang cukup memadai dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan PHBS jika tidak diikuti dengan implementasi program lainnya guna meningkatkan kesadaran PHBD masyarakat.



7. Mutu dan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan belum optimal
- Dari 12 program prioritas yang memiliki potensi dampak/risiko negatif terhadap lingkungan yang dikaji, tidak ada program yang mempunyai potensi pengaruh negatif terhadap isu mutu dan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan belum optimal. Hal ini menunjukkan, program-program tersebut dinilai cukup memadai dalam mengatasi permasalahan peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Buleleng.



Tabel 3.6
Matriks Penapisan Pengaruh Program Prioritas
terhadap Isu-Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

No	Program RPJMD	Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan																			Jumlah	
		A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	Positif	Negatif
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	-	0	0	0	-	+	+	+	+	+	+	+	0	-	+	+	+	+	+	11	4
2	Program pembangunan infrastruktur perdesaan;	-	0	0	0	-	+	+	+	+	+	+	+	0	-	+	+	+	+	+	11	4
3	Program Pengembangan Perumahan	-	-	-	0	-	0	0	+	+	+	0	+	-	-	+	+	+	-	+	7	8
4	Program peningkatan iklim dan realisasi investasi	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+	9	9
5	Program pengembangan perikanan budidaya	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	0	+	0	-	+	0	0	0	0	7	6
6	Program pengembangan kawasan budidaya perikanan	0	-	0	-	0	+	+	+	+	+	+	0	0	-	+	0	0	0	0	7	3
7	Program pengembangan perikanan tangkap	0	0	0	-	0	+	+	+	+	+	+	0	0	-	+	0	0	0	0	7	2
8	Program Pengembangan	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	0	11	7



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No	Program RPJMD	Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan																			Jumlah	
		A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	Positif	Negatif
	Destinasi Pariwisata																					
9	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (tanaman pangan)	0	0	0	0	-	+	+	+	+	0	+	+	+	0	+	0	+	0	0	8	1
10	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	0	0	0	0	-	+	+	+	+	0	+	+	+	0	+	0	+	0	0	8	1
11	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	-	0	0	0	-	+	+	+	+	0	+	+	+	0	+	0	+	0	0	8	2
12	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	0	-	-	0	0	+	+	+	+	+	+	+	0	0	+	+	0	-	0	9	3

Keterangan :

A1 = menurunnya kondisi daerah aliran sungai (DAS)

A2 = Pencemaran lingkungan oleh air limbah

A3 = sanitasi lingkungan belum memadai, terutama karena pengelolaan persampahan yang belum optimal

A4 = kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang dan padang lamun

A5 = ancaman perubahan iklim

B1 = rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat, terutama generasi muda

B2 = daya saing UMKM masih rendah

B3 = kondisi ekonomi perdesaan belum mampu mencegah migrasi tenaga kerja produktif ke wilayah perkotaan ataupun ke luar daerah

B4 = pendapatan perkapita penduduk masih rendah dan belum merata

B5 = iklim investasi belum kondusif

B6 = kondisi infrastruktur kawasan strategis belum optimal

B7 = kesenjangan ekonomi antar wilayah perdesaan dan kecamatan masih tinggi

C1 = lunturnya kearifan lokal karena meningkatnya pengaruh budaya asing

C2 = pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi dan persebaran penduduk tidak merata



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

- C3 = penanganan Kemiskinan dan penangguran belum optimal
- C4 = PMKS dan pelayanan sosial
- C5 = pelestarian budaya belum optimal
- C6 = perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum optimal
- C7 = mutu dan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan belum optimal.



3.4 Tahap Alternatif Penyempurnaan dan/atau Mitigasi

3.4.1 Alternatif Penyempurnaan Kebijakan

Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 dilakukan dengan mengembangkan pemikiran guna menyempurnakan uraian visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan berdasarkan hasil pengkajian terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tujuan agar kebijakan yang disusun memenuhi kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, meliputi yaitu:

1. Keterkaitan kebijakan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 dengan kebijakan RPJPD Kabupaten Buleleng 2005-2025 untuk memenuhi kaidah keterkaitan antar waktu dalam pencapaian visi jangka panjang daerah.
2. Keterkaitan kebijakan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 dengan kebijakan RPJMN 2015-2019 untuk menjaga konsisten kebijakan pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional.
3. Keterkaitan kebijakan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 dengan kebijakan RPJMD Provinsi Bali 2013-2018 untuk menjaga konsisten kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan Daerah Bali.
4. Keterkaitan kebijakan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 dengan kebijakan RPJMD Kabupaten Buleleng 2012-2017 untuk memenuhi kaidah keterkaitan antar waktu dan kesinambungan pembangunan dalam pencapaian visi jangka panjang daerah.
5. Keterkaitan antar wilayah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan rumusan kebijakan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 untuk menjaga pemerataan dan keterpaduan pembangunan.
6. Keseimbangan antara kepentingan lingkungan, ekonomi dan sosial budaya rumusan kebijakan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022



untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak bias lingkungan hidup dan sosial budaya.

7. Keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi rumusan kebijakan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 untuk memastikan pembangunan tidak memarginalkan sekelompok masyarakat dan mengabaikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasinya.

Berdasarkan hasil pengkajian maka dilakukan perumusan alternatif penyempurnaan/perbaikan kebijakan (uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan) dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 sebagai berikut (**Tabel 3.7** sampai **Tabel 3.10**).

Dari Tabel tersebut dapat diringkaskan alternatif penyempurnaan kebijakan Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu :

- a. Alternatif penyempurnaan Uraian Visi

Uraian Visi telah memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

- b. Alternatif penyempurnaan rumusan Misi

Misi RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 sudah memiliki keterkaitan dengan Misi RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025. Namun dalam kaitannya dengan Misi RPJMN Tahun 2015-2019, perlu penajaman Misi 6 RPJMD yang berkenaan dengan upaya memperteguh kebinekaan. Dalam kaitannya dengan Misi RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018, perlu ada penyempurnaan Misi RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan mempertegas upaya mewujudkan keamanan Bali. Sedangkan terkait dengan upaya menjaga konsistensi dan keberlanjutan kebijakan dengan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten



Buleleng Tahun 2012-2017, perlu penyempurnaan Misi 6 dengan mempertegas adanya upaya penegakan supremasi hukum.

c. Alternatif penyempurnaan rumusan Tujuan dan Sasaran

Uraian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 telah memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

d. Alternatif penyempurnaan rumusan Strategi dan Arah Kebijakan

Uraian rumusan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 telah memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

3.4.2 Perumusan Mitigasi dan/atau Alternatif Penyempurnaan Program

Perumusan mitigasi dan/atau alternatif penyempurnaan program pembangunan jangka menengah daerah dilakukan melalui tahap identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif penyempurnaan program berdasarkan hasil pengkajian pengaruh program prioritas terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan. Perumusan mitigasi pengaruh program pembangunan pada prinsipnya merupakan usulan-usulan tambahan dan/atau alternatif tindakan dalam pelaksanaan program dengan mengembangkan pemikiran atau upaya untuk mencegah, mengendalikan dan memitigasi dampak serta upaya mendorong pembangunan berkelanjutan. Sedangkan alternatif penyempurnaan program yaitu mengusulkan penambahan dan/atau pengeliminasian program berdasarkan potensi pengaruh atau dampaknya terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip mitigasi dan/atau alternatif penyempurnaan program dilakukan dengan :



- a. Merumuskan mitigasi berupa *counter programs* untuk meminimalkan potensi dampak negatif yang timbul dari pelaksanaan program pembangunan dengan mempertimbangkan intensitas, persebaran, lokasi, lamanya dampak berlangsung dan akumulasi dampak.
- b. Merumuskan mitigasi sebagai langkah-langkah atau upaya untuk meminimalkan dampak, memaksimalkan manfaat dan meningkatkan keberlanjutan, dengan memastikan bahwa mitigasi yang disarankan tidak akan menimbulkan dampak negatif baru.
- c. Merumuskan mitigasi berisi kalimat atau uraian yang menggambarkan langkah-langkah yang bersifat preventif untuk mengurangi dampak negatif atau risiko pelaksanaan program.

Mitigasi dan/atau alternatif penyempurnaan program prioritas berdasarkan hasil pengkajian pengaruh program prioritas dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan sebagai berikut :

1. Menurunnya kondisi Daerah Aliran Sungai

Program-program RPJMD yang memiliki potensi pengaruh negatif terhadap kondisi DAS adalah program pembangunan jalan dan jembatan, program pembangunan infrastruktur perdesaan, program pengembangan perumahan, program peningkatan iklim dan realisasi investasi, program pengembangan perikanan budidaya, program pengembangan destinasi pariwisata, dan peningkatan produksi perkebunan.

Alternatif penyempurnaan program guna meminimalkan pengaruh terhadap isu strategis menurunnya kondisi DAS sebagai berikut :

- 1) Program Pembangunan jalan dan jembatan memperhatikan ketersediaan dan luasan RTH, menanam pohon perindang (pembuatan turus jalan), menghindari/mengurangi kawasan perlindungan setempat (sempadan, sumber mata air, dll.), menghindari penggunaan lahan-lahan produktif dan kawasan hutan.



- 2) Program pembangunan infrastruktur perdesaan harus diimbangi dengan penataan RTH, pembuatan saluran drainase, penataan dan pelestarian lingkungan perdesaan, seperti pelestarian sumber mata air, pembuatan sumur resapan air, lubang biopori, pengelolaan persampahan, dll.
- 3) Program Pengembangan Perumahan memperhatikan kawasan RTH, pembuatan lubang biopori, dll.
- 4) Program peningkatan iklim dan realisasi investasi tetap memperhatikan kawasan RTH (melakukan penanaman pohon perindang), melakukan pengendalian pencemaran tanah dan air.
- 5) Program pengembangan perikanan budidaya dilakukan dengan mengoptimalikan kapasitas kawasan yang ada, disertai pengendalian pencemaran tanah dan air.
- 6) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata disertasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung, serta penataan dan pelestarian lingkungan hidup.
- 7) Program Peningkatan Produksi perkebunan dilakukan dengan menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan (memaksimalkan penggunaan input-input organik).

2. Pencemaran lingkungan oleh air limbah

Program-program RPJMD yang mempunyai potensi pengaruh negatif terhadap terjadinya pencemaran lingkungan air limbah adalah program pengembangan perumahan, program peningkatan investasi dan realisasi investasi, program pengembangan perikanan budidaya, program pengembangan destinasi pariwisata, dan program peningkatan produksi hasil peternakan.

Untuk meminimalkan pengaruh program-program tersebut di atas maka dibutuhkan program-program mitigasi dan alternatif penyempurnaan program. Program-program mitigasi pengaruh meliputi :



- 1) Program Pengembangan Perumahan diikuti dengan penataan lingkungan perumahan yang sehat, seperti pembuatan IPAL komunal, pembuatan lubang biopori, dll.
 - 2) Program peningkatan iklim dan realisasi investasi diikuti dengan kewajiban bagi investor untuk melakukan pengendalian pencemaran tanah, dan air.
 - 3) Program pengembangan perikanan budidaya dilakukan dengan mengoptimalikan kapasitas kawasan yang ada, disertai pengendalian pencemaran air dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun)
 - 4) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata disertasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung, serta penataan dan pelestarian lingkungan hidup.
 - 5) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan diarahkan di luar kawasan pemukiman, disertai pengelolaan (pengolahan dan pemanfaatan) limbah ternak.
3. Sanitasi lingkungan belum memadai, terutama karena pengelolaan persampahan yang belum optimal

Program yang memiliki potensi pengaruh negatif terhadap isu sanitasi lingkungan adalah program pengembangan perumahan, program peningkatan investasi dan realisasi investasi, program pengembangan destinasi pariwisata, dan program peningkatan produksi hasil peternakan.

Untuk meminimalkan pengaruh program-program tersebut di atas maka dibutuhkan program-program mitigasi dan alternatif penyempurnaan program. Program-program mitigasi pengaruh meliputi :

- 1) Program Pengembangan Perumahan memperhatikan kawasan RTH, melakukan penataan lingkungan perumahan yang sehat, seperti pengelolaan persampahan.



- 2) Program peningkatan iklim dan realisasi investasi diikuti dengan kewajiban investor untuk melakukan pengendalian pencemaran tanah, air, dan sampah, termasuk limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).
- 3) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata disertasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung, serta penataan dan pelestarian lingkungan hidup.
- 4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan diarahkan di luar kawasan pemukiman, disertai pengelolaan (pengolahan dan pemanfaatan) limbah ternak dan pengelolaan sampah.

Disamping penyempurnaan program tersebut, upaya pendukung juga perlu dilakukan, yaitu melalui program pengelolaan persampahan dan penegakan perturan perundang-undangan.

4. Kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang dan padang lamun

Program yang mempunyai potensi pengaruh negatif terhadap isu kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang dan padang lamun adalah program peningkatan investasi dan realisasi investasi, program pengembangan perikanan budidaya, program pengembangan kawasan budidaya perikanan, program pengembangan perikanan tangkap, dan program pengembangan destinasi pariwisata.

Untuk meminimalkan pengaruh program-program tersebut di atas maka dibutuhkan program-program mitigasi dan alternatif penyempurnaan program. Program-program mitigasi pengaruh meliputi :

- 1) Program peningkatan iklim dan realisasi investasi diikuti dengan kewajiban bagi investor untuk melakukan pengendalian pencemaran air, sampah dan limbah B3 (bahan berbahaya dan



beracun), serta upaya-upaya menjaga kelestarian sumber daya perairan/laut.

- 2) Program pengembangan perikanan budidaya dilakukan dengan mengoptimalikan kapasitas kawasan yang ada, disertai pengendalian pencemaran tanah dan air, serta limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).
- 3) Program pengembangan kawasan budidaya perikanan dioptimalkan pada kawasan yang sesuai, dengan melakukan pengendalian pengendalian pencemaran tanah dan air, serta limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).
- 4) Program pengembangan perikanan tangkap dilakukan dengan pengembangan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan diimbangi dengan pelestarian sumberdaya laut.
- 5) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata disertasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung, serta penataan dan pelestarian lingkungan hidup.

5. Ancaman perubahan iklim

Program prioritas yang berpotensi memiliki dampak/risiko negatif terhadap isu ancaman perubahan iklim adalah program pembangunan jalan dan jembatan, program pembangunan infrastruktur perdesaan, program pengembangan perumahan, program peningkatan investasi dan realisasi investasi, program pengembangan perikanan budidaya, program pengembangan destinasi pariwisata, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan (tanaman pangan), program peningkatan produksi hortikultura, dan program peningkatan produksi perkebunan.

Untuk meminimalkan pengaruh program-program tersebut di atas maka dibutuhkan program-program mitigasi dan alternatif penyempurnaan program. Program-program mitigasi pengaruh meliputi :



- 1) Program Pembangunan jalan dan jembatan memperhatikan ketersediaan dan luasan RTH, menanam pohon perindang (pembuatan turus jalan), menghindari/mengurangi kawasan perlindungan setempat (sempadan, sumber mata air, dll.), menghindari penggunaan lahan-lahan produktif dan kawasan hutan.
- 2) Program pembangunan infrastruktur perdesaan harus diimbangi dengan penataan RTH, pembuatan saluran drainase, penataan dan pelestarian lingkungan perdesaan, seperti pelestarian sumber mata air, pembuatan sumur resapan air, lubang biopori, pengelolaan persampahan, dll.
- 3) Program Pengembangan Perumahan memperhatikan kawasan RTH, melakukan penataan lingkungan perumahan yang sehat, seperti pembuatan IPAL komunal, pembuatan lubang biopori, dll.
- 4) Program peningkatan iklim dan realisasi investasi tetap memperhatikan kawasan RTH (melakukan penanaman pohon perindang), melakukan pengendalian pencemaran tanah, air, udara dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).
- 5) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata disertasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung, serta penataan dan pelestarian lingkungan hidup.
- 6) Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan (tanaman pangan) dilakukan dengan menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan (memaksimalkan penggunaan input-input organik).
- 7) Program Peningkatan Produksi hortikultura dilakukan dengan menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan (memaksimalkan penggunaan input-input organik).
- 8) Program Peningkatan Produksi perkebunan dilakukan dengan menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan (memaksimalkan penggunaan input-input organik).



6. Lunturnya kearifan lokal karena meningkatnya pengaruh budaya asing

Program prioritas yang mempunyai potensi pengaruh negatif terhadap isu lunturnya kearifan lokal karena meningkatnya pengaruh budaya asing adalah program pengembangan perumahan, program peningkatan investasi dan realisasi investasi, dan program pengembangan destinasi pariwisata.

Untuk meminimalkan pengaruh program-program tersebut di atas maka dibutuhkan program-program mitigasi dan alternatif penyempurnaan program. Program-program mitigasi pengaruh meliputi :

- 1) Program Pengembangan Perumahan memperhatikan adat dan tradisi lokal masyarakat setempat.
- 2) Program peningkatan iklim dan realisasi investasi diikuti dengan kewajiban investor untuk menaati adat dan budaya setempat.
- 3) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata disertai dengan pengembangan dan pelestarian adat dan budaya setempat/local.

7. Pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi dan persebaran penduduk tidak merata

Program prioritas yang berpotensi memiliki potensi pengaruh negatif terhadap isu pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi dan persebaran penduduk tidak merata adalah program pembangunan jalan dan jembatan, program pengembangan infrastruktur perdesaan, program pengembangan perumahan, program peningkatan investasi dan realisasi investasi, program pengembangan budidaya perikanan, program pengembangan kawasan budidaya perikanan, dan program pengembangan perikanan tangkap.



Untuk meminimalkan pengaruh program-program tersebut di atas maka dibutuhkan program-program mitigasi dan alternatif penyempurnaan program. Program-program mitigasi pengaruh meliputi :

- 1) Program Pembangunan jalan dan jembatan memperhatikan konektivitas antar wilayah dan pemerataan persebaran penduduk.
- 2) Program pembangunan infrastruktur perdesaan dilakukan dengan membuka akses ke sumber-sumber ekonomi dan memperhatikan persebaran penduduk.
- 3) Program Pengembangan Perumahan dilakukan pada wilayah yang sesuai dan mematuhi peraturan tentang kependudukan.
- 4) Program peningkatan iklim dan realisasi investasi diikuti dengan kewajiban investor untuk mematuhi aturan tentang kependudukan.
- 5) Program pengembangan perikanan budidaya dilakukan dengan mengoptimalikan kapasitas kawasan yang ada, disertai kewajiban bagi investor ataupun penduduk pendatang mematuhi aturan tentang kependudukan.
- 6) Program pengembangan kawasan budidaya di optimalkan pada kawasan yang sesuai, disertai kewajiban investor ataupun penduduk pendatang untuk mematuhi peraturan tentang kependudukan.
- 7) Program pengembangan perikanan tangkap yang dilakukan lintas daerah agar diikuti dengan kewajiban penduduk pendatang mematuhi peraturan tentang kependudukan.

8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum optimal

Program prioritas yang mempunyai potensi pengaruh negatif terhadap isu pelestarian budaya belum optimal, yaitu program pengembangan destinasi pariwisata.



Untuk meminimalkan pengaruh program-program tersebut di atas maka dibutuhkan program-program mitigasi dan alternatif penyempurnaan program. Program-program mitigasi pengaruh meliputi.

- 1) Program pengembangan destinasi pariwisata diikuti pula dengan program-program pemberdayaan masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sehingga tidak menciptakan lokasi kumuh baru.



Tabel 3.7
Matriks Telaah Program Rancangan RPJMD
dengan Aspek Kajian Pasal 16 UU Nomor 32 Tahun 2009

No	Program RPJMD	Aspek Kajian Pasal 16 UU No. 32 Tahun 2009					
		Kapasitas DDL/DTL	Perkiraan mengenai dampak dan risiko LH	Kinerja layanan atau jasa ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SDA	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi KEHATI
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Masih memenuhi DDL/DTL	Berkontribusi terhadap perubahan iklim, kemerosotan hayati, mutu SDA, terjadinya alih fungsi lahan, penduduk miskin, berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia	Menurunkan jasa penyediaan pangan, sumberdaya genetik, serat alam, estetika alam dan pemerliharaan udara	Meningkatkan efisiensi SDA	Meningkatkan resiko perubahan iklim karena terjadi pembukaan lahan	Berpengaruh terhadap kehati
2	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Masih memenuhi DDL/DTL	Menurunkan intensitas dan cakupan wilayah bencana, mutu SDA, peningkatan	Peningkatan penyediaan air bersih, penurunan penyediaan pangan, serat, estetika alam,	Meningkatkan efisiensi SDA	Meningkatkan resiko perubahan iklim karena meningkatnya volume bangunan fisik	Berpengaruh terhadap kehati



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No	Program RPJMD	Aspek Kajian Pasal 16 UU No. 32 Tahun 2009					
		Kapasitas DDL/DTL	Perkiraan mengenai dampak dan risiko LH	Kinerja layanan atau jasa ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SDA	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi KEHATI
			alih fungsi lahan, peningkatan penanganan penduduk miskin dan kesehatan serta keselamatan manusia.	lapisan tanah dan kesuburan tanah			
3	Program Pengembangan Perumahan	Mempengaruhi jasa ekosistem penyediaan air bersih, pangan, serat, estetika alam, tempat tinggal dan ruang hidup, lapisan tanah dan kesuburan tanah	Menurunkan kondisi menyebabkan perubahan iklim, kemerosotan hayati, mutu SDA, terjadinya alih fungsi lahan, Peningkatan intensitas dan cakupan bencana, penduduk miskin, resiko kesehatan dan keselamatan manusia	Menurunkan penyediaan air bersih, pangan, serat, estetika alam, tempat tinggal dan ruang hidup, lapisan tanah dan kesuburan tanah	Meningkatkan efisiensi SDA	Meningkatkan resiko perubahan iklim karena meningkatnya volume bangunan fisik perumahan	berpengaruh terhadap kehati



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No	Program RPJMD	Aspek Kajian Pasal 16 UU No. 32 Tahun 2009					
		Kapasitas DDL/DTL	Perkiraan mengenai dampak dan risiko LH	Kinerja layanan atau jasa ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SDA	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi KEHATI
4	Program peningkatan iklim dan realisasi investasi	Mempengaruhi jasa ekosistem penyediaan rekreasi dan ecotourism, tempat tinggal dan ruang hidup, pengaturan iklim	menurunkan keseimbangan perubahan iklim dan keanekaragaman hayati, kualitas SDA, meningkatkan alih fungsi lahan, resiko terhadap kesehatan. Meningkatkan penanganan kemiskinan	Menurunkan penyediaan jasa ekosistem tempat tinggal dan ruang hidup, Peningkatan rekreasi dan ecotourism, peningkatan kewirausahaan, ekonomi pedesaan, iklim investasi dan pendapatan penduduk	Meningkatkan efisiensi SDA	meningkatkan resiko perubahan iklim, akibat bangunan fisik terkait dengan realisasi investasi	Berpengaruh terhadap kehati
5	Program pengembangan perikanan budidaya	Masih memenuhi DDL/DTL	menjaga keseimbangan iklim, dan meningkatkan keanekaragaman hayati, mutu SDA, alih fungsi lahan, penanganan penduduk miskin	menurunkan penyediaan air bersih, meningkatkan penyediaan pangan, serat hewan, sumberdaya genetik, dan rekreasi dan ecotourism	Meningkatkan efisiensi SDA	tidak berpengaruh pada perubahan iklim	Tidak berpengaruh terhadap kehati



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No	Program RPJMD	Aspek Kajian Pasal 16 UU No. 32 Tahun 2009					
		Kapasitas DDL/DTL	Perkiraan mengenai dampak dan risiko LH	Kinerja layanan atau jasa ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SDA	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi KEHATI
6	Program pengembangan kawasan budidaya perikanan	Masih memenuhi DDL/DTL	Meningkatkan keragaman hayati, kualitas sumberdaya dan penanganan penduduk miskin	Meningkatkan jasa penyediaan pangan, sumberdaya genetik, estetika alam, bioversitas	Meningkatkan efisiensi SDA	tidak berpengaruh pada perubahan iklim	Tidak berpengaruh terhadap kehati
7	Program pengembangan perikanan tangkap	Masih memenuhi DDL/DTL	Menjaga perubahan iklim, keragaman hayati, menjaga kualitas SDA	Meningkatkan penyediaan pangan dan sumberdaya genetik	Meningkatkan efisiensi SDA	tidak berpengaruh pada perubahan iklim	Berpengaruh terhadap kehati
8	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Masih memenuhi DDL/DTL	Meningkatkan perubahan iklim, keragaman hayati, menjaga kualitas SDA, kualitas kawasan hutan dan lahan, intensitas dan cakupan bencana, penanganan penduduk	Menurunkan penyediaan pangan dan sumberdaya genetik. Menjaga estetika, rekreasi dan ekotourism	Meningkatkan efisiensi SDA	berpengaruh pada perubahan iklim	Tidak berpengaruh terhadap kehati



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No	Program RPJMD	Aspek Kajian Pasal 16 UU No. 32 Tahun 2009					
		Kapasitas DDL/DTL	Perkiraan mengenai dampak dan risiko LH	Kinerja layanan atau jasa ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SDA	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi KEHATI
			miskin dan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan				
9	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (tanaman pangan)	Masih memenuhi DDL/DTL	Menjaga perubahan iklim, menjaga kualitas SDA, penanganan penduduk miskin dan tercegahnya ancaman keberlanjutan kehidupan kelompok masyarakat	Menurunkan penyediaan pangan, penyediaan energi, sumberdaya genetik. Meningkatkan estetika alam, pembentukan lapisan dan kesuburan, pengendalian hama dan kualitas udara	Meningkatkan efisiensi SDA	tidak berpengaruh pada perubahan iklim	Tidak berpengaruh terhadap kehati
10	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Masih memenuhi DDL/DTL	Menjaga perubahan iklim, menjaga kualitas SDA, penanganan penduduk miskin dan	Menurunkan penyediaan pangan, penyediaan energi, sumberdaya genetik.	Meningkatkan efisiensi SDA	tidak berpengaruh pada perubahan iklim	Tidak berpengaruh terhadap kehati



No	Program RPJMD	Aspek Kajian Pasal 16 UU No. 32 Tahun 2009					
		Kapasitas DDL/DTL	Perkiraan mengenai dampak dan risiko LH	Kinerja layanan atau jasa ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SDA	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi KEHATI
			tercegahnya ancaman keberlanjutan kehidupan kelompok masyarakat	Meningkatkan estetika alam, pembentukan lapisan dan kesuburan, pengendalian hama dan kualitas udara			
11	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Masih memenuhi DDL/DTL	Menjaga perubahan iklim, keaneka ragaman hayati, intensitas dan cakupan bencana, menjaga kualitas SDA, mencegah alih fungsi kawasan dan lahan, penanganan penduduk miskin dan tercegahnya ancaman keberlanjutan kehidupan	Meningkatkan jasa penyediaan pangan, energi, sumberdaya genetik, estetika alam, pembentukan lapisan tanah dan kesuburan, pengendalian hama, pemeliharaan kualitas udara, Penyerbukan alami	Meningkatkan efisiensi SDA	tidak berpengaruh pada perubahan iklim	Tidak berpengaruh terhadap kehati



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No	Program RPJMD	Aspek Kajian Pasal 16 UU No. 32 Tahun 2009					
		Kapasitas DDL/DTL	Perkiraan mengenai dampak dan risiko LH	Kinerja layanan atau jasa ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SDA	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi KEHATI
			kelompok masyarakat				
12	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Masih memenuhi DDL/DTL	Meningkatkan perubahan iklim, menurunkan kualitas SDA, meningkatkan penanganan penduduk miskin dan tercegahnya ancaman keberlanjutan kehidupan kelompok masyarakat, peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan	Menurunnya jasa penyediaan air bersih, meningkatkan jasa penyediaan pangan, energi, serat hewan, menurunkan ekosistem tempat tinggal dan ruang hidup, pembentukan lapisan tanah dan kesuburan, menurunnya kualitas udara	Meningkatkan efisiensi SDA	berpengaruh pada perubahan iklim	Tidak berpengaruh terhadap kehati



Tabel 3.8
Matriks Perumusan Alternatif Penyempurnaan
Program RPJMD

No	Materi Muatan KRP	Analisa Manfaat dan Resiko	Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	<u>Manfaat:</u> 1) pemanfaatan kawasan secara efisien, 2) peningkatan penanganan penduduk miskin, 3) meningkatkan penanganan kesehatan dan keselamatan masyarakat. <u>Resiko:</u> 1) perubahan iklim, 2) Kemerosotan hayati, 3) penurunan mutu SDA, 4) Peningkatan alih fungsi kawasan hutan	Program Pembangunan jalan dan jembatan memperhatikan ketersediaan dan luasan RTH, menanam pohon perindang (pembuatan turus jalan), menghindari/mengurangi kawasan perlindungan setempat (sempadan, sumber mata air, dll.), menghindari penggunaan lahan-lahan produktif dan kawasan hutan
2	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	<u>Manfaat:</u> 1) pemanfaatan kawasan secara efisien, 2) peningkatan penanganan penduduk miskin, 3) meningkatkan penanganan kesehatan dan keselamatan masyarakat <u>Resiko:</u> 1) perubahan iklim, 2) Perubahan pengaturan udara	Program pembangunan infrastruktur perdesaan harus diimbangi dengan penataan RTH, pembuatan saluran drainase, penataan dan pelestarian lingkungan perdesaan, seperti pelestarian sumber mata air, pembuatan sumur resapan air, lubang biopori, pengelolaan persampahan, dll.
3	Program Pengembangan Perumahan	<u>Manfaat :</u> 1) meningkatkan ketersediaan perumahan bagi masyarakat miskin, 2) peningkatan penanganan kesehatan dan keselamatan penduduk. <u>Meningkatkan resiko:</u> 1) perubahan iklim, 2) merosotnya keaneka ragaman hayati dan 3) menurunnya	Program Pengembangan Perumahan memperhatikan kawasan RTH, melakukan penataan lingkungan perumahan yang sehat, seperti pembuatan IPAL komunal, pembuatan lubang biopori, dll.



No	Materi Muatan KRP	Analisa Manfaat dan Resiko	Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP
		pengaturan udara	
4	Program peningkatan iklim dan realisasi investasi	<u>Manfaat:</u> 1) meningkatnya investasi guna pengembangan ekonomi pedesaan, kewirausahaan dan UMKM 2) peningkatan mutu layanan kesehatan dan pendidikan. <u>Resiko:</u> 1) perubahan iklim, 2) alih fungsi lahan dan 3) penurunan mutu SDA	Program peningkatan iklim dan realisasi investasi tetap memperhatikan kawasan RTH (melakukan penanaman pohon perindang), melakukan pengendalian pencemaran tanah, air, udara dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun)
5	Program pengembangan perikanan budidaya	<u>Manfaat:</u> 1) penyediaan pangan, 2) peningkatan keragaman hayati <u>Resiko:</u> penyediaan air bersih	Program pengembangan perikanan budidaya dilakukan dengan mengoptimalkan kapasitas kawasan yang ada, disertai pengendalian pencemaran tanah, air, udara dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun)
6	Program pengembangan kawasan budidaya perikanan	<u>Manfaat:</u> 1) penyediaan pangan, 2) peningkatan keragaman hayati; <u>resiko:</u> -	Program pengembangan kawasan budidaya di optimalkan pada kawasan yang sesuai, dengan melakukan pengendalian pengendalian pencemaran tanah, air, udara dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun)
7	Program pengembangan perikanan tangkap	<u>Manfaat:</u> penyediaan pangan dan sumberdaya genetik Risiko : 1) kerusakan ekosistem laut, 2) penurunan kehati	Program pengembangan perikanan tangkap dilakukan dengan pengembangan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan diimbangi dengan pelestarian sumberdaya laut
8	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	<u>Manfaat:</u> menjaga estetika, rekreasi dan ekotourism. <u>Resiko:</u> Menurunkan penyediaan pangan dan	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata disertai pembangunan sarana dan prasarana pendukung, serta



No	Materi Muatan KRP	Analisa Manfaat dan Resiko	Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP
		sumberdaya genetik	penataan dan pelestarian lingkungan hidup
9	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (tanaman pangan)	<u>Manfaat:</u> 1) penyediaan ketersediaan pangan <u>Risiko :</u> penurunan kesuburan tanah dan kualitas air	Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan (tanaman pangan) dilakukan dengan menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan (memaksimalkan penggunaan input-input organik)
10	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	<u>Manfaat:</u> 1) penyediaan ketersediaan pangan <u>Risiko :</u> penurunan kesuburan tanah dan kualitas air	Program Peningkatan Produksi hortikultura dilakukan dengan menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan (memaksimalkan penggunaan input-input organik)
11	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	<u>Manfaat:</u> 1) penyediaan ketersediaan pangan/ bahan baku industri <u>Risiko :</u> penurunan kesuburan tanah dan kualitas air	Program Peningkatan Produksi hortikultura dilakukan dengan menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan (memaksimalkan penggunaan input-input organik)
12	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	<u>Manfaat:</u> meningkatkan jasa penyediaan pangan, energi, serat hewan, pembentukan lapisan tanah dan kesuburan,. <u>Resiko:</u> menurunnya jasa penyediaan air bersih, menurunkan ekosistem tempat tinggal dan ruang hidup, menurunnya kualitas udara	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan diarahkan di luar kawasan pemukiman, disertai pengelolaan (pengolahan dan pemanfaatan) limbah ternak



Tabel 3.9

Matriks Rekomendasi Penyempurnaan Program RPJMD

No	Materi Muatan KRP	Alternatif Penyempurnaan KRP	REKOMENDASI	
			Materi Perbaikan KRP	Informasi Jenis Usaha/Kegiatan yang Sudah Melampaui DDL/DTL dan Sudah Tidak Diperbolehkan Lagi
1	Program pembangunan jalan dan jembatan	Program Pembangunan jalan dan jembatan memperhatikan ketersediaan dan luasan RTH, menanam pohon perindang (pembuatan turus jalan), menghindari/mengurangi kawasan perlindungan setempat (sempadan, sumber mata air, dll.), menghindari penggunaan lahan-lahan produktif dan kawasan hutan	Pada Bab VII Sub Bab Dinas PUPR	Belum melampaui DDL/DTL dan diperbolehkan
2	Program pembangunan infrastruktur perdesaan;	Program pembangunan infrastruktur perdesaan harus diimbangi dengan penataan RTH, pembuatan saluran drainase, penataan dan pelestarian lingkungan perdesaan, seperti pelestarian sumber mata air, pembuatan sumur resapan air, lubang biopori, pengelolaan persampahan,	Pada Bab VII Sub Bab Dinas PUPR	Belum melampaui DDL/DTL dan diperbolehkan



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No	Materi Muatan KRP	Alternatif Penyempurnaan KRP	REKOMENDASI	
			Materi Perbaikan KRP	Informasi Jenis Usaha/Kegiatan yang Sudah Melampaui DDL/DTL dan Sudah Tidak Diperbolehkan Lagi
		dll.		
3	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan memperhatikan kawasan RTH, melakukan penataan lingkungan perumahan yang sehat, seperti pembuatan IPAL komunal, pembuatan lubang biopori, dll.	Pada Bab VII Sub Bab Dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman	Belum melampaui DDL/DTL dan diperbolehkan
4	Program peningkatan iklim dan realisasi investasi	Program peningkatan iklim dan realisasi investasi tetap memperhatikan kawasan RTH (melakukan penanaman pohon perindang), melakukan pengendalian pencemaran tanah, air, udara dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun)	Pada Bab VII Sub Bab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Prizinan Terpadu Satu Pintu	Belum melampaui DDL/DTL dan diperbolehkan
5	Program pengembangan perikanan budidaya	Program pengembangan perikanan budidaya dilakukan dengan mengoptimalikan kapasitas kawasan yang ada, disertai pengendalian pencemaran tanah, air, udara dan limbah B3 (bahan berbahaya dan	Pada Bab VII Sub Bab Dinas Perikanan dan Kelautan	Belum melampaui DDL/DTL dan diperbolehkan



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No	Materi Muatan KRP	Alternatif Penyempurnaan KRP	REKOMENDASI	
			Materi Perbaikan KRP	Informasi Jenis Usaha/Kegiatan yang Sudah Melampaui DDL/DTL dan Sudah Tidak Diperbolehkan Lagi
		beracun)		
6	Program pengembangan kawasan budidaya perikanan	Program pengembangan kawasan budidaya di optimalkan pada kawasan yang sesuai, dengan melakukan pengendalian pengendalian pencemaran tanah, air, udara dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun)	Pada Bab VII Sub Bab Dinas Perikanan	Belum melampaui DDL/DTL dan diperbolehkan
7	Program pengembangan perikanan tangkap	Program pengembangan perikanan tangkap dilakukan dengan pengembangan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan diimbangi dengan pelestarian sumberdaya laut	Pada Bab VII Sub Bab Dinas Perikanan	Belum melampaui DDL/DTL dan diperbolehkan
8	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata disertai pembangunan sarana dan prasarana pendukung, serta penataan dan pelestarian lingkungan hidup	Pada Bab VII Sub Bab Dinas Pariwisata	Belum melampaui DDL/DTL dan diperbolehkan
9	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan	Pada Bab VII Sub Bab Dinas Pertanian	Belum melampaui DDL/DTL dan diperbolehkan



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Materi Muatan KRP	Alternatif Penyempurnaan KRP	REKOMENDASI	
			Materi Perbaikan KRP	Informasi Jenis Usaha/Kegiatan yang Sudah Melampaui DDL/DTL dan Sudah Tidak Diperbolehkan Lagi
		(tanaman pangan) dilakukan dengan menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan (memaksimalkan penggunaan input-input organik)		
10	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Program Peningkatan Produksi hortikultura dilakukan dengan menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan (memaksimalkan penggunaan input-input organik)	Pada Bab VII Sub Bab Dinas Pertanian	Belum melampaui DDL/DTL dan diperbolehkan
11	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Program Peningkatan Produksi hortikultura dilakukan dengan menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan (memaksimalkan penggunaan input-input organik)	Pada Bab VII Sub Bab Dinas Pertanian	Belum melampaui DDL/DTL dan diperbolehkan
12	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan diarahkan di luar kawasan pemukiman, disertai pengelolaan (pengolahan dan pemanfaatan) limbah ternak	Pada Bab VII Sub Bab Dinas Pertanian	Belum melampaui DDL/DTL dan diperbolehkan